

**PENGARUH *DEBT TO EQUITY RATIO*, BEBAN PAJAK KINI DAN PAJAK  
TANGGUHAN TERHADAP LABA BERSIH PERUSAHAAN YANG  
TERDAFTAR DALAM *JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)*  
PERIODE 2014-2019**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



Oleh:

**Dewi Larasati**

**1605046005**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
a.n Sdri. Dewi Larasati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

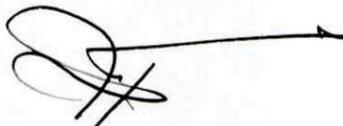
Nama : Dewi Larasati  
NIM : 1605046005  
Judul Skripsi : Pengaruh Hutang, Beban Pajak Kini dan Pajak Tanggahan Terhadap Laba Bersih Perusahaan yang Terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2014-2019.

Dengan ini kami menyetujui mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 09 Desember 2021

Pembimbing I



**Dr. H. Wahab Zaenuri, MM**  
NIP: 19690908 200003 1 001

Pembimbing II



**Singgih Muheramtahadi, M.E.I**  
NIP: 19821031 201503 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @walisongo.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : Dewi Larasati

NIM : 1605046005

Judul : Pengaruh *Debt to Equity Ratio*, Beban Pajak Kini dan Pajak Tangguhan Terhadap Laba Bersih Perusahaan yang Terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* Periode 2014-2019.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 20 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 30 Desember 2021

Ketua Sidang

H. Maltuf Fitri, SE., MM  
NIP. 19741016 200312 1 003

Sekretaris Sidang

Singgih Muheramtohad, M.E.I.  
NIP. 19821031 201503 1 003

Penguji I

Dessy Noor Farida, SE, M. Si, Ak CA  
NIP. 19791222 201503 2 004

Penguji II

Irma Istiariani, SE., M.Si  
NIP. 19880708 201903 2 013

Pembimbing I

Dr. H. Wahab Zaenuri, MM  
NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing II

Singgih Muheramtohad, M.E.I.  
NIP. 19821031 201503 1 003



## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS. *Al-Insyirah*: 5-6)

"Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berutang meskipun kalian merasakan kesulitan, karena sesungguhnya utang adalah kehinaan di siang hari, kesengsaraan di malam hari." -Umar bin Abdul Aziz

"Birakmadan önce neden başladığınızı hatırlayın (Sebelum kamu berhenti, ingatlah kenapa kamu memulai)." -Putra Marenda Aldisha Wijaya

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebagai tanda bukti dan terima kasih, karya kecil berupa skripsi ini penulis persembahkan kepada:

### **Kedua orang tua tercinta**

Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Maskur dan Ibu Siti Nafisatun yang selalu mengiringi langkah penulis dengan doa dan kasih sayang. Terima kasih untuk keduanya atas dukungan semangat baik moril maupun materiil serta nasihat-nasihat yang selalu menguatkan.

### **Adikku tersayang**

Untuk adikku tersayang, Munawar Ru'yat yang selalu menjadi penyemangat. Semoga karya kecil ini bisa menjadi penyemangat untuk menuntut ilmu dan menggapai cita-cita.

### **Keluarga Besar Penulis**

Terima kasih kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moril dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

### **Teman Seperjuangan**

Terima kasih kepada Ahmad Nur Mubarak yang selalu menemani, menjadi tempat keluh kesah dan memberikan semangat serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih kepada Alviyah Nur Rohmah, teman-temanku kelas Akuntansi Syariah, rekan kerjaku all team ID Express Mitra SOC yang selalu memberikan semangat, doa, dan bantuannya dalam proses penyusunan skripsi.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 11 Desember 2021

Deklarator



**Dewi Larasati**

**1605046005**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pedoman yang digunakan sebagai penyedia informasi dalam skripsi untuk informasi nama orang, judul buku, nama lembaga, dan sebagainya yang harusnya ditulis dengan huruf Arab, akan tetapi disalin ke dalam huruf latin. Oleh karena itu, untuk menjaga konsistensi dalam informasi, maka perlu ditetapkan transliterasi. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan R.I. menetapkan pedoman transliterasi dalam Surat keputusan Bersama (SKB) Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

### A. Konsonan

Konsonan adalah daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huuf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Aprostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa ada tanda apapun. Akan tetapi apabila terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab ini, lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal diftong atau vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan I

Contoh:

كَيْف = *Kaifa*

هَوْل = *Haula*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. Syaddah ( ّ-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبّ *al-thibb*.

### E. Kata sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*-..... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al*- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-l.ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

Suatu perusahaan secara umum dibentuk dan dijalankan guna menghasilkan *profit* yang maksimal. Salah satu keputusan yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan usahanya adalah memanfaatkan hutang sebagai salah satu sumber dana perusahaan. Meskipun pemanfaatan hutang sebagai sumber dana perusahaan memiliki risiko yang cukup besar, namun hal tersebut dapat menjadi keuntungan bagi perusahaan sebab tingginya biaya atau hutang dapat menjadi pengurang jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan yang akan berpengaruh terhadap perolehan laba.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Debt to Equity Ratio*, beban pajak kini, dan pajak tangguhan terhadap laba bersih perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* periode 2014-2019 baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kuantitatif yang mana pengujiannya menggunakan metode pengujian statistik. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan sampel sembilan perusahaan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Debt to Equity Ratio*, beban pajak kini, dan pajak tangguhan secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih. Sedangkan, secara parsial hanya beban pajak kini yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih.

**Kata kunci: Hutang, *Debt to Equity Ratio* (DER), Beban Pajak Kini, Pajak Tangguhan, Laba Bersih**

## **ABSTRACT**

*A company is generally formed and run in order to generate maximum profit. One of the decisions that companies can use to achieve these goals and develop their business is to use debt as a source of company funds. Although the use of debt as a source of company funds carries a considerable risk, this can be an advantage for the company because the high of cost or debt can reduce the amount of taxes that must be paid by the company which will affect profit.*

*This research is a library research with a quantitative approach. This study aims to determine the effect of Debt to Equity Ratio, current tax expense, and deferred tax on the net income of companies listed in the Jakarta Islamic Index (JII) for the 2014-2019 period, either partially or simultaneously. This research method used is quantitative research where the test uses statistical testing methods. The data used in the form of secondary data with a sample of nine companies determined by purposive sampling technique. Analysis of the data used is multiple linear regression analysis with the help of SPSS.*

*The results of this study indicate that Debt to Equity Ratio, current tax expense, and deferred tax simultaneously affect net income. Meanwhile, partially only the current tax expense has a significant effect on net income.*

***Keywords: Debt, Debt to Equity Ratio, Current Tax Expense, Deffered Tax, Net Income***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Debt to Equity*, Beban Pajak Kini dan Pajak Tangguhan Terhadap Laba Bersih Perusahaan yang Terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* periode 2014-2019”**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Strata 1 Akuntansi Syari’ah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selama penulisan skripsi, penulis menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas terciptanya system akademik yang sangat mendukung bagi penulis dan mahasiswa lainnya untuk belajar.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Wahab Zaenuri, MM selaku Dosen pembimbing 1 dan Singgih Muheramtohad, M.E.I selaku Dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan dan arahnya dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah dan Warno, SE., M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan semangat dan doanya, memotivasi agar lebih giat lagi dalam belajar, membantu dan memberi arahan serta bimbingan serta memberikan perhatian kepada penulis dan mahasiswa lainnya.
5. Keluarga besar penulis, terima kasih atas bimbingan dan doanya.
6. Teman-temanku seperjuangan dan rekan-rekan kerja yang selalu memberi semangat dan bantuan.

7. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan semangat, doa, saran, nasehat, dan bantuannya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 11 Desember 2021



**Dewi Larasati**

**NIM: 1605046005**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Konsep Laba dan Laba Bersih.....	13
2.1.2 Terori <i>Agency</i> .....	18
2.1.3 Hutang ( <i>Liabilities</i> ).....	19
2.1.3.1 Pengertian Hutang ( <i>Liabilities</i> ).....	19
2.1.3.2 Klasifikasi Hutang.....	21
2.1.3.3 Konsep Hutang dalam Perspektif Islam.....	23

2.1.3.4 Kebijakan Hutang.....	26
2.1.3.5 <i>Debt to Equity Ratio</i> .....	27
2.1.4 Ruang Lingkup Pajak.....	28
2.1.4.1 Definisi dan Fungsi Pajak.....	28
2.1.4.2 Konsep Pajak Menurut Yusuf Qardawi.....	29
2.1.4.3 Kewajiban Membayar Pajak.....	32
2.1.5 Akuntansi Pajak.....	33
2.1.6 Pajak Penghasilan.....	36
2.1.6.1 Pengertian Penghasilan.....	36
2.1.6.2 Pajak Penghasilan.....	37
2.1.6.3 Perhitungan Pajak Penghasilan.....	39
2.1.7 Akuntansi Pajak Penghasilan Basis psak No. 46.....	40
2.1.8 Pajak Kini.....	42
2.1.9 Pajak Tangguhan.....	43
2.1.9.1 Penilaian dan Pengakuan Pajak Tangguhan.....	44
2.1.9.2 Pencatatan dan Penyajian.....	46
2.1.10 Perbedaan Laba / Rugi Akuntansi (Komersial) dengan Laba /Rugi Fiskal.....	48
2.1.11 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal.....	51
2.1.12 <i>Jakarta Islamic Index (JII)</i> .....	55
2.2 Penelitian Terdahulu.....	69
2.3 Kerangka Pemikiran.....	74
2.4 Hipotesis Penelitian.....	74
2.4.1 Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> terhadap Laba Bersih.....	74
2.4.2 Pengaruh Beban Pajak Kini terhadap Laba Bersih.....	75
2.4.3 Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Laba Bersih.....	76
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>78</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	78
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	78

3.3	Pouulasi dan Sampel.....	79
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	80
3.5	Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	80
3.5.1	Variabel Independen (X).....	81
3.5.1.1	<i>Debt to Equity Ratio</i> (X1).....	81
3.5.1.2	Beban Pajak Kini (X2).....	82
3.5.1.3	Pajak Tangguhan (X3).....	83
3.5.2	Variabel Dependen (Y).....	83
3.6	Teknik Analisis Data.....	84
3.6.1	Statistik Deskriptif.....	84
3.6.2	Uji Asumsi Klasik .....	84
3.6.2.1	Uji Normalitas.....	85
3.6.2.2	Uji Multikolonearitas.....	85
3.6.2.3	Uji Autokorelasi.....	87
3.6.2.4	Uji Heteroskedastisitas.....	87
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	88
3.6.4	Uji Hipotesis.....	89
3.6.4.1	Koefisien Determinasi.....	89
3.6.4.2	Uji Simultan (Uji Statistik F).....	89
3.6.4.3	Uji Regresi Parsial (Uji Statistik t).....	90
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>		<b>91</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	91
4.2	Analisis dan Interpretasi Data.....	92
4.2.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	92
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	94
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	94
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas.....	95
4.2.2.3	Uji Autokorelasi.....	96
4.2.2.4	Uji Heteroskedastisitas.....	97

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda.....	98
4.2.4 Uji Hipotesis.....	99
4.2.4.1 Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ).....	99
4.2.4.2 Uji Simultan (Uji Statistik F).....	100
4.2.4.3 Uji Regresi Parsial (Uji Statistik t).....	101
4.3 Hasil Penelitian.....	102
4.3.1 Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> terhadap Laba Bersih.....	102
4.3.2 Pengaruh Beban Pajak Kini terhadap Laba Bersih.....	104
4.3.3 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Laba Bersih..	105
4.3.4 Pengaruh Hutang, Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan terhadap Laba Bersih.....	106
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>108</b>
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	109
5.3 Saran.....	109
5.4 Penutup.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>116</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Tarif Pajak WP OP .....	39
Tabel 2.2 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Desember 2013 s.d Mei 2014.....	56
Tabel 2.3 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni s.d November 2014.....	57
Tabel 2.4 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Desember 2014 s.d Mei 2015.....	58
Tabel 2.5 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni s.d November 2015.....	59
Tabel 2.6 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Desember 2015 s.d Mei 2016.....	60
Tabel 2.7 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni s.d November 2016.....	61
Tabel 2.8 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Desember 2016 s.d Mei 2017.....	62
Tabel 2.9 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni s.d November 2017.....	63
Tabel 2.10 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Desember 2017 s.d Mei 2018.....	64
Tabel 2.11 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni s.d November 2018.....	65
Tabel 2.12 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Desember 2018 s.d Mei 2019.....	66
Tabel 2.13 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni s.d November 2019.....	67
Tabel 2.14 : Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII) Periode Desember 2019 s.d Mei 2020.....	68
Tabel 2.15 Penelitian Terdahulu.....	69

Tabel 4.1 : Daftar Sampel Penelitian.....	92
Tabel 4.2 : Hasil Statistik Deskriptif .....	93
Tabel 4.3 : Grafik <i>Normal Probability Plot (p-p Plot) of Regression</i> .....	94
Tabel 4.4 : Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	95
Tabel 4.5 : Hasil Uji Multikolinearitas.....	96
Tabel 4.6 : Hasil Uji Autokorelasi.....	97
Tabel 4.7 : Hasil Heteroskedastisitas.....	98
Tabel 4.8 : Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	98
Tabel 4.9 : Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	100
Tabel 4.10: Hasil Uji Simultan (Uji F).....	100
Tabel 4.11: Hasil Uji Statistik t .....	101

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Laba Bersih (Net Profit) dan Hutang PT. AKR Corporindo Tbk Periode 2015-2019 .....	08
Gambar 1.2 : Laba Bersih (Net Profit) dan Hutang PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2015-2019 .....	09
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.....	74

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Total Hutang Periode 2014-2019.....	116
Lampiran 2	: Total Ekuitas Periode 2014-2019.....	117
Lampiran 3	: Total Asset Periode 2013-2018.....	118
Lampiran 4	: Beban Pajak Kini Periode 2014-2019.....	119
Lampiran 5	: Pajak Tangguhan Periode 2014-2019.....	120
Lampiran 6	: Laba Bersih Periode 2014-2019.....	121
Lampiran 7	: Data Penelitian.....	122
Lampiran 8	: Hasil Output SPSS.....	124

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Persaingan bisnis yang semakin ketat menandai bahwa perkembangan ekonomi di suatu negara semakin pesat. Hal ini menyebabkan setiap perusahaan dituntut memiliki keunggulan dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan investasi. Besarnya keinginan masyarakat muslim di Indonesia dalam berinvestasi menyebabkan kebutuhan akan kegiatan investasi syariah sangat diperlukan. Oleh sebab itu, Bursa Efek Indonesia menyediakan pasar modal syariah sebagai ruang untuk menampung berbagai kegiatan investasi syariah.

Pasar modal syariah merupakan suatu ruang bagi perusahaan publik untuk menawarkan dan memperdagangkan efek yang diterbitkan, dimana produk serta prosedur atau mekanisme transaksinya telah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Produk yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah berupa efek syariah seperti sukuk, reksadana syariah maupun instrumen syariah lainnya. Munculnya Reksa Dana Syariah yang diterbitkan oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997 menjadi awal didirikannya pasar modal syariah di Indonesia. Kemudian, Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management merilis *Jakarta Islamic Index* (JII) dengan tujuan membantu dan memandu pemilik modal dalam menginvestasikan dananya sesuai dengan syariah tanpa khawatir terdapat unsur ribawi pada 3 Juli 2000.<sup>1</sup>

Suatu perusahaan secara umum dibentuk dan dijalankan guna menghasilkan *profit* yang maksimal. *Profit* yang maksimal diharapkan mampu membuat suatu perusahaan bertahan (*survive*) dan terus berkembang dalam persaingan. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan wajib menjaga dan meningkatkan kinerjanya dalam berbagai aktivitas. Kinerja suatu perusahaan dapat diketahui dengan mengamati dan mencermati kondisi keuangan

---

<sup>1</sup> <https://www.ojk.go.id> diakses pada Selasa, 11 Agustus 2020.

perusahaan melalui laporan keuangan yang telah diterbitkan. Laporan keuangan berisi informasi terkait posisi keuangan perusahaan, kinerja maupun perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan serta dapat digunakan untuk meramalkan situasi keuangan suatu perusahaan pada periode mendatang.

Bagi setiap muslim, sikap *ta'awun* telah menjadi kewajiban sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Begitu pula dalam hal ekonomi, suatu perusahaan pasti akan membutuhkan pihak lain untuk membantu mengembangkan usahanya. Salah satu keputusan yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan usahanya adalah memanfaatkan hutang sebagai salah satu sumber dana perusahaan. Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 6* tentang "*Elements of Financial Statement*", dijelaskan bahwa "*liability* adalah pengorbanan sumber ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari kewajiban saat ini dari suatu kesatuan usaha untuk mentransfer *asset* atau menyerahkan jasa kepada suatu kesatuan usaha lain di masa akan datang, sebagai akibat transaksi di masa lalu".<sup>2</sup> Dengan kata lain, hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain diluar perusahaan yang muncul karena transaksi masa lampu dan harus dikembalikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Rasulullah SAW dalam beberapa hadits telah memperingatkan kita mengenai kewajiban membayar hutang. Salah satunya adalah hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ  
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

<sup>2</sup> Winwin Yadiati, *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 71.

*Artinya: “Telah menceritakan kepada ‘Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada Malik, dari Abi Zanad, dari A’raj, dari Abi Hurairah ra: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kedzaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti.” (HR. Bukhari)<sup>3</sup>*

Hadits tersebut mengandung perintah untuk menyegerakan pembayaran hutang sekaligus peringatan bahwa menunda pembayaran hutang termasuk perbuatan yang dzalim. Oleh karena itu, perusahaan (*debitur*) apabila telah mampu untuk membayar kewajibannya maka tidak boleh menunda-nunda pembayaran hutang.

Hutang-piutang merupakan muamalah yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Meskipun demikian, keputusan pemanfaatan hutang sebagai tambahan modal memiliki risiko yang cukup besar apabila perusahaan tidak berhati-hati dalam menerapkannya. Risiko tersebut adalah perusahaan dapat mengalami kerugian, pailit, *financial distress* maupun bangkrut. Hal ini disebabkan karena ketidakpastian masa depan, misalnya perusahaan akan memiliki angka hutang yang tinggi namun pendapatan yang diterima perusahaan tidak seimbang sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Salah satu perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah PT. Indika Energy Tbk pada tahun 2015 hingga 2016 yang menyebabkan perusahaan tersebut *delisting* dari Jakarta Islamic Index.<sup>4</sup> *Financial distress* umumnya terjadi sebelum kebangkrutan, yang mana menunjukkan bahwa terdapat kondisi kesulitan keuangan belum teratasi sehingga kebangkrutan sangat mungkin terjadi. Cara untuk melihat kemampuan suatu perusahaan terkait kebijakan hutang yang di ambil perusahaan dapat diketahui dengan menghitung *debt to equity* rasionya. Dengan cara ini, perusahaan dapat

---

<sup>3</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail al Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih*, Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/ 1987 M, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, 2013, hlm. 94.

<sup>4</sup> Ikhwan Ratna dan Marwati, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kondisi *Financial Distress* pada Perusahaan yang *Delisting* dari Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016”, *Jurnal Tabaru’: Islamic Banking and Finance*, No. I, Vol. 1, ISSN 2621-7465, Mei 2018, hlm. 51-62.

mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang. Besarnya hutang tersebut dapat mempengaruhi jumlah laba yang akan diperoleh perusahaan karena beban yang muncul semakin tinggi. Namun, hal tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan sebab tingginya beban dapat menjadi pengurang jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.<sup>5</sup> Selain, *debt to equity ratio*, salah satu komponen yang dapat berpengaruh terhadap *profit* yang akan dicapai perusahaan adalah beban pajak. Hal ini disebabkan karena setiap penghasilan yang diterima perusahaan harus dikenai pajak penghasilan. Semakin tinggi *profit* yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang akan ditanggung perusahaan.

Menurut Erly Suandy, pajak dapat dianggap sebagai biaya yang akan mempengaruhi laba (*profit margin*) dan sebagai distribusi laba yang akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*).<sup>6</sup> Bagaimanapun, dalam akuntansi, pajak merupakan unsur pengurang keuntungan perusahaan yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali. Perusahaan harus melunasi pajak sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah, meskipun pajak terhadap penghasilan dianggap sebagai beban (*expense*) oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan Q.S an-Nisa (4): 59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ  
 فِي شَيْءٍ فَردُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ  
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-*

<sup>5</sup> Vera Handayani dan Mayasari, “Analisis Pengaruh Hutang Terhadap Laba Bersih Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)”, *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol. 18, No. 1, ISSN : 1693-759, Maret 2018, hlm. 39-50.

<sup>6</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hlm. 6.

*Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>7</sup>*

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa kita harus taat kepada *ulil amri* setelah kita taat kepada Allah SWT dan rasul-Nya. *Ulil amri* yang dimaksud adalah pemimpin (pemerintah) yang taat pada ajaran Islam atau saat ini berarti pemimpin (pemerintah) yang mementingkan kemaslahatan umat. Jadi apabila pemerintah memerintahkan untuk membayar pajak yang akan digunakan untuk kemaslahatan rakyat, maka perusahaan harus membayar pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atas setiap pendapatan yang diterima. Dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau *taxable profit* (laba fiskal). Penghasilan Kena Pajak atau PKP merupakan keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan selama satu periode yang dasar penghitungannya ditentukan oleh peraturan perpajakan.<sup>8</sup> Cara menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan diharuskan membuat koreksi fiskal. Koreksi ini dilakukan dengan alasan terdapat perbedaan antara laba komersial atau laba akuntansi (*accounting profit*) dengan Penghasilan Kena Pajak.

Pajak kini dan pajak tangguhan merupakan komponen dari pajak penghasilan yang telah diatur dalam PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak kini adalah jumlah pajak yang dibebankan dan harus dibayar oleh perusahaan saat ini. Sedangkan, pajak tangguhan adalah total pajak untuk masa mendatang yang muncul karena perbedaan yang tidak tetap atau temporer atas pengakuan penghasilan atau beban antara akuntansi komersial dengan peraturan pajak yang berlaku. Pengakuan pajak tangguhan dalam laporan laba rugi dapat menyebabkan berkurangnya keuntungan bersih apabila terdapat pengakuan beban pajak tangguhan. Begitupun sebaliknya,

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Puataka Indonesia, 2012, hlm. 114.

<sup>8</sup> Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, hlm. 244.

apabila terdapat pengakuan manfaat pajak tangguhan dapat menyebabkan berkurangnya rugi bersih.<sup>9</sup> *Deferred tax liabilities* atau kewajiban pajak tangguhan merupakan total pajak penghasilan yang terutang atau harus dibayarkan untuk periode berikutnya sebagai akibat adanya perbedaan sementara (temporer) kena pajak, sedangkan aktiva pajak tangguhan adalah aktiva yang terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan penyesuaian positif sehingga menghasilkan beban pajak menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban pajak menurut peraturan pajak.

Penurunan laba setelah pajak (*after tax profit*), arus kas (*cash flows*) dan tingkat pengembalian (*rate of return*) akibat adanya beban pajak menyebabkan banyak perusahaan melakukan praktik manajemen laba guna menghindari atau menyelamatkan diri dari melaporkan kerugian dengan berbagai keinginan, seperti keinginan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menghasilkan laporan keuangan yang terlihat lebih baik. Salah satu kasus yang terjadi di dunia bisnis terkait hal tersebut adalah manipulasi yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia yang berhasil membukukan laba bersih sebesar US\$809 ribu atau sekitar Rp 11 miliar pada 2018, berbanding terbalik dengan tahun 2017 yang mengalami kerugian US\$216,58 juta atau sekitar Rp 3 triliun. Hal ini terjadi karena PT. Garuda mencatat transaksi dengan PT. Mataha sebagai pendapatan sehingga perusahaan memiliki laba bersih yang tinggi atau dinyatakan untung padahal seharusnya PT. Garuda masih merugi.<sup>10</sup> Tindakan tersebut merupakan salah satu praktik manajemen laba dimana perusahaan membuat laporan keuangannya terlihat lebih baik. Akibat hal ini juga, PT. Garuda Indonesia harus menanggung beban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, beban tersebut seharusnya belum menjadi kewajiban karena pembayaran dari kerjasama dengan Mataha belum masuk perusahaan.

Kasus lain terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT. Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing*

---

<sup>9</sup> Erly Suandy, *Perencanaan...*, hlm.109.

<sup>10</sup> <https://m.cnnindonesia.com>, diakses pada Minggu, 23 Februari 2020.

melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. PT. Adaro Energy Tbk melarikan pendapatan dan labanya sekitar 125 juta dolar AS per tahun dalam kurun 2009-2017 ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia yakni senilai 14 juta dolar AS per tahun.<sup>11</sup> Bahkan, ada kasus suap restitusi pajak yang dilakukan oleh PT. Wahana Auto Eka Marga (PT. WAE) dengan pegawai Kementerian Keuangan. PT. Wahana Auto Eka Marga (PT. WAE) melaporkan SPT Tahunan PPh WP Badan tahun 2015 yang seharusnya kurang bayar, tetapi karena suap ini, PT. WAE mendapatkan restitusi sebesar Rp 4,59 Miliar sebagai hasil dari lebih bayar. Begitu juga untuk SPT Tahunan 2016, PT. WAE mendapatkan restitusi sebesar Rp 2,7 Miliar.<sup>12</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa manajemen perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk mengoptimalkan laba perusahaan dan meminimalkan beban pajak, baik itu dengan cara melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) maupun dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Laba merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Perolehan laba suatu perusahaan bagi *stakeholder* sering dijadikan sebagai acuan penilaian berhasil atau tidaknya kinerja ekonomi suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan tujuan utamanya adalah laba, maka manajemen harus berupaya untuk memperoleh laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada, termasuk beban pajak dan biaya keuangan. Semakin besar biaya yang mampu diminimalkan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan laba bersih perusahaan.<sup>13</sup> Menurunnya angka laba dalam laporan keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu masalah bagi manajemen maupun pemakai laporan keuangan. Oleh sebab itu, perusahaan akan berupaya agar perusahaannya tidak mengalami penurunan laba.

---

<sup>11</sup> <https://www.tirto.id>, diakses pada Minggu, 23 Februari 2020.

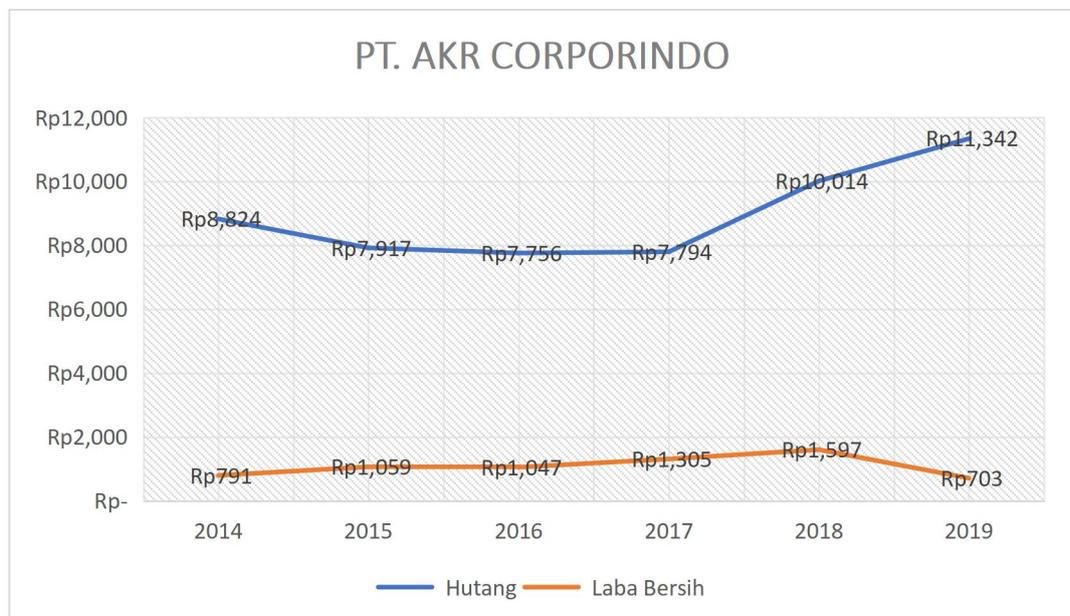
<sup>12</sup> <https://m.cnnindonesia.com>, diakses pada Minggu, 23 Februari 2020.

<sup>13</sup> Astriningrum, Andini Retno et. al., "Pengaruh Penjualan, Beban Pokok Penjualan, Pajak Dan Biaya Keuangan Terhadap Laba Rugi Perusahaan Jasa Telekomunikasi", *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 4, No. 2, ISSN 2477-2275, November 2018, hlm. 108-118.

Salah satu indeks saham syariah adalah *Jakarta Islamic Index* (JII) yang beranggotakan tiga puluh saham syariah paling *liquid* yang tercatat di BEI dan telah memenuhi kriteria tertentu. Diantara kriteria tersebut ialah ditentukan dari urutan *average* kapitalisasi pasar yang paling signifikan dalam satu tahun terakhir dan nilai transaksi harian di pasar reguler.<sup>14</sup> Penentuan tiga puluh saham yang akan menjadi anggota JII, dalam satu tahun dilakukan sebanyak dua kali. Oleh sebab itu, perusahaan yang listing di JII diharapkan telah sejalan dengan standar syariah dan mampu bertahan serta bebas dari praktik perataan laba.

PT. AKR Corporindo Tbk dan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk adalah beberapa perusahaan yang listing di *Jakarta Islamic Index* (JII) yang pernah membukukan penurunan laba bersih namun hutang yang dimiliki meningkat. Berikut ini dijelaskan bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki laba bersih dan jumlah hutang yang mengalami naik turun (berfluktuasi).

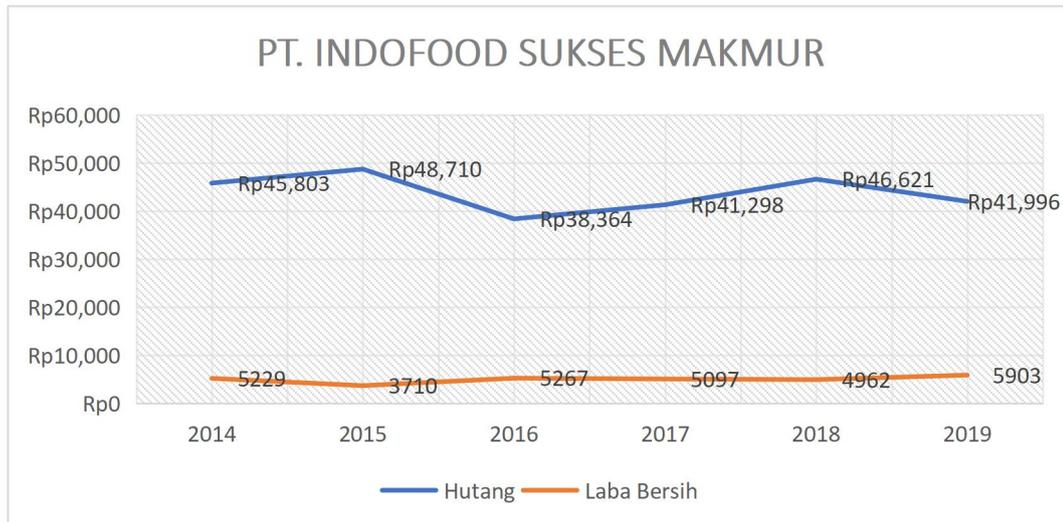
**Gambar 1.1**  
**Laba Bersih dan Hutang PT. AKR Corporindo Tbk Periode 2015-2019**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

<sup>14</sup> <https://www.idx.co.id> diakses pada Selasa, 11 Agustus 2020.

**Gambar 1.2**  
**Laba Bersih dan Hutang PT. Indofood Sukses Makmur Tbk**  
**Periode 2015-2019**



Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Dari data tersebut, laba bersih dan nilai hutang perusahaan di atas mengalami naik turun (berfluktuasi). Bahkan, PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA) mengalami penurunan laba bersih yang signifikan pada tahun 2019 yakni sekitar Rp 893,5 miliar sedangkan nilai hutang tercatat mengalami kenaikan sekitar Rp 1,328 miliar. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan laba bersih pada tahun 2017 sebesar Rp 169,6 miliar dan pada 2018 sebesar Rp 135 miliar, sedangkan nilai tercatat untuk hutang mengalami kenaikan.

Penelitian sebelumnya terkait dengan hutang yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* telah dilakukan oleh Asti Asita (2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara parsial hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba. Penelitian lain dilakukan oleh Ervina Indriyani (2018) yang menyatakan bahwa hutang berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih, sedangkan Vera Handayani dan Mayasari (2018) mengungkapkan bahwa hutang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Sementara itu, terkait beban pajak kini dan pajak tangguhan sebelumnya Achmad Hidayat (2018) telah meneliti kedua variabel

tersebut dengan hasil yang menyatakan bahwa beban pajak saat ini dan pajak tangguhan secara parsial dan sekaligus berpengaruh pada laba bersih, sehingga dua variabel tersebut dapat digunakan untuk menilai nilai laba bersih yang akan diperoleh perusahaan. Namun, penelitian Elyzabet I. Marpaungan Lauw Tjun (2016) mengungkapkan bahwa pajak tangguhan tidak mempengaruhi kinerja perusahaan yang mana indikator kinerjanya adalah laba bersih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum ada pendapat yang konsisten terkait pengaruh *Debt to Equity Ratio*, beban pajak kini dan pajak tangguhan terhadap laba bersih karena terdapat perbedaan antara hasil penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menuangkan hal-hal yang terkait dengan hutang yang diproksikan dengan *debt to equity ratio*, beban pajak dan laba perusahaan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH *DEBT TO EQUITY RATIO*, BEBAN PAJAK KINI DAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP LABA BERSIH PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM *JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)* PERIODE 2014-2019.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *debt to equity ratio* memiliki pengaruh terhadap laba bersih perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* periode 2014-2019?
2. Apakah beban pajak kini memiliki pengaruh terhadap laba bersih perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* periode 2014-2019?
3. Apakah pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap laba bersih perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index (JII)* periode 2014-2019?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *debt to equity ratio* terhadap laba bersih perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2014-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh beban pajak kini terhadap laba bersih perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2014-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak tangguhan terhadap laba bersih perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2014-2019.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki berbagai manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis  
Sebagai sumber informasi dan bahan rujukan bagi penelitian yang akan datang dan memberikan kontribusi pemikiran serta memperkaya khasanah keilmuan bagi semua aktivitas akademik dalam bidang akuntansi.
2. Bagi Perusahaan Publik  
Dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan manajemen terkait hutang dan beban pajak.
3. Bagi Investor dan Calon Investor  
Sebagai salah satu sumber pertimbangan untuk menentukan pilihan usaha.
4. Bagi Penulis  
Sebagai salah satu tambahan wawasan dan pengetahuan penulis tentang hutang, pajak kini, pajak tangguhan dan laba bersih perusahaan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri atas teori yang menjelaskan pengertian atau definisi dan hal-hal yang berkaitan dengan hutang, *debt to equity ratio*, beban pajak kini, dan pajak tangguhan, serta laba bersih yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan variabel penelitian. Penulis juga mengambil dari beberapa *literature review* yang berhubungan dengan penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan. Menguraikan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan data yang diperoleh serta menjelaskan mengenai analisis dan interpretasi dari hasil penelitian tersebut.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai hasil dari penelitian serta saran bagi peneliti berikutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Konsep Laba dan Laba Bersih

Laba umumnya merupakan sisa lebih dari pendapatan atas biaya yang telah dikeluarkan selama periode akuntansi. Laba memiliki arti yang berbeda dalam teori akuntansi dengan ekonomi. Dalam akuntansi, laba atau keuntungan diartikan sebagai suatu tambahan atau kenaikan dalam aktiva perusahaan pada periode tertentu atas keberhasilan kegiatan operasi yang telah dijalankan. Sedangkan, dalam teori ekonomi, laba adalah hasil yang didapatkan dari pengguna kekayaan maupun jasa manusia yang berupa uang atau lainnya.<sup>15</sup>

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyebutkan bahwa “penghasilan bersih atau laba merupakan pengukur kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang menjadi pusat perhatian para pemakai laporan keuangan.”<sup>16</sup> Berikut adalah definisi laba atau *profit* menurut para akuntan:

Menurut Iwan Triyuwono dan Mohammad As’udi, laba merupakan:

“kelebihan pendapatan (*surplus*) dari kegiatan usaha yang dihasilkan dengan mengaitkan (*matching*) antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan.”<sup>17</sup>

Menurut Rudianto dalam Masril, laba usaha adalah:

---

<sup>15</sup> Nasrullah HS, et. al, “Analisis Tindakan Perataan Laba dalam Meraih Keuntungan Perusahaan Ditinjau Menurut Etika Ekonomi Islam,” *Jurnal SHARE*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2014, hlm. 159.

<sup>16</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 13.

<sup>17</sup> Iwan Triyuwono dan Mohammad As’udi, *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 9.

“selisih antara pendapatan dan total beban usaha pada periode tersebut.”<sup>18</sup>

Menurut Subramanyam, laba adalah:

“keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perusahaan yang dikurangi oleh beban usaha dan kerugian.”<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laba merupakan selisih antara pendapatan dengan beban dari kegiatan perusahaan yang berlangsung selama suatu periode yang dapat digunakan sebagai pengukur atas kinerja keuangan perusahaan. Laba usaha diperoleh apabila selisih yang dihasilkan bernilai positif. Sedangkan, rugi usaha terjadi apabila selisih tersebut bernilai negatif. Perolehan laba perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai tambahan modal, meningkatkan kesejahteraan karyawan atas jasa yang diperoleh, dan melakukan perluasan distribusi.

Keuntungan atau laba telah menjadi tujuan utama dalam dunia bisnis. Dalam bahasa Arab, laba disebut *ribh* yang memiliki arti pertumbuhan dalam dagang. Sesuai dengan firman Allah SWT, lafad *ribh* terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2): 16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا  
كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: “mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”<sup>20</sup>

Dalam tafsir al-Nasafi yang dikutip oleh Ida Fitriana ayat di atas ditafsirkan bahwa *profit* atau keuntungan adalah angka lebih dari modal, sedangkan perniagaan atau perdagangan merupakan pekerjaan seorang

<sup>18</sup> Masril, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Plastik Dan Kaca Yang Listing Di Bei Periode 2010 – 2014,” *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, Januari 2017, hlm. 663.

<sup>19</sup> K.R. Subramanyam dan J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, hlm. 4.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran ...*, hlm. 4.

pedagang yakni seseorang yang membeli dan menjual kembali dengan maksud mencari laba. Adapun maksud dari laba yang disandarkan pada perdagangan adalah sebuah kiasan atas membeli sesuatu yang sesat tetapi dengan kebenaran atau petunjuk. Hal ini kemudian diikuti dengan penyebutan keuntungan dan niaga serta mereka tidak mendapat petunjuk dalam perniagaan atau perdagangan mereka yang bermakna seperti pada pelaku usaha yang selalu merasakan kerugian dan keuntungan dalam kegiatannya.<sup>21</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, *al-ribh* (keuntungan) adalah hasil yang diperoleh pedagang atas tambahan harga barang terhadap harga pembelian dengan penjualan barang yang diperjualbelikannya. Seorang muslim dalam Islam tidak dilarang mengambil keuntungan atau laba. Meskipun demikian, pengusaha muslim seharusnya tidak mencari keuntungan yang maksimum, apalagi untuk menumpuk kekayaan. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa pengurangan *margin* keuntungan dengan menjual barang pada harga yang lebih rendah mampu meningkatkan volume penjualan sehingga keuntungan yang diperoleh dapat meningkat pula.<sup>22</sup>

Menurut Hendriksen dan Van Breda, terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam struktur teori akuntansi yang dapat digunakan untuk mengetahui serta memahami konsep laba, yaitu: melalui pendekatan sintaksis, pendekatan semantis, dan pendekatan pragmatis.<sup>23</sup>

- a. Konsep laba secara sintaksis adalah memahami keuntungan melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya atau menafsirkan laba atau keuntungan akuntansi melalui tulisan ataupun ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan muamalah. Interpretasi tersebut dijalankan guna menggali konvensi dan aturan logis yang harus terpenuhi dalam bermuamalah.

---

<sup>21</sup> Ida Friatna, *Konsep Laba dalam Ekonomi Islam*, Banda Aceh: PeNA, 2012, hlm. 79.

<sup>22</sup> Ida Friatna, *Konsep ...*, hlm. 81.

<sup>23</sup> Kurnia Ekasari, "Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 5, No. 1, April 2014, hlm. 68.

- b. Secara semantis adalah memahami keuntungan melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari atau menginterpretasikan laba akuntansi dari teks ataupun ayat-ayat Al-Qur'an yang dihubungkan dengan realita konsep laba akuntansi pada saat ini. Hal tersebut dilakukan guna menguraikan hubungan antara kalimat yang tercantum dalam ayat-ayat al-Qur'an, makna maupun simbol yang mewakili laba akuntansi tersebut.
- c. Secara pragmatis adalah melalui penggunaan keuntungan oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana keuntungan tersebut diukur dan mengetahui apa artinya. Maksudnya adalah menginterpretasikan laba akuntansi dari teks ataupun ayat-ayat Al-Qur'an yang dihubungkan dengan *stakeholder* yang berkepentingan terhadap informasi tersirat dari laba perusahaan.

Laba dalam konsep akuntansi syariah terbagi atas bagi hasil (*profit sharing*), keuntungan (*margin*), dan upah atas jasa. Laba diakui ketika terdapat kenaikan nilai yang diikuti dengan aktivitas ekonomi yang nyata. Keuntungan dari kegiatan utama dan dari modal utama memiliki perbedaan dengan keuntungan yang bersumber dari transaksi, yaitu keuntungan yang berasal dari dana haram tidak diizinkan dibagi kepada mitra usaha serta tidak diperbolehkan untuk dicampur dalam modal utama.<sup>24</sup>

Laba bersih adalah sisa dari keseluruhan pendapatan atas biaya untuk seluruh periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi. Iwan Triyuwono dan Mohammad As'udi mengungkapkan bahwa:

“Laba bersih adalah jumlah keseluruhan dari laba yang berasal dari hasil operasional usaha atau laba biasa dan dari hasil non-operasional atau keuntungan dan kerugian luar biasa.”<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 88.

<sup>25</sup> Iwan Triyuwono dan Mohammad As'udi, *Akuntansi ...*, hlm. 1.

Sedangkan, Rasyid mengutip pendapat Hendriksen dan Breda yang mengungkapkan bahwa:

“Laba bersih merupakan *net income to shareholders* atau laba bersih bagi pemegang saham yang akan dibagikan dalam bentuk dividen.”<sup>26</sup>

Laba bersih (*net income*) merupakan selisih yang menunjukkan nilai lebih atau positif antara total pendapatan dengan biaya. Sehingga kedua pos tersebut akan menentukan besarnya jumlah laba yang diperoleh perusahaan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba bersih (*net income*) adalah kelebihan positif seluruh pendapatan dikurangi seluruh biaya yang berasal dari aktivitas operasi maupun *non-operasi* untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.<sup>27</sup>

Laporan laba rugi menjadi kajian penting dalam menganalisis kinerja perusahaan karena laba bersih dalam laporan tersebut memiliki banyak kegunaan, diantaranya berfungsi sebagai dasar pembagian dividen, dasar dalam perpajakan, acuan berinvestasi dan pengambilan keputusan, serta digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Pertumbuhan ataupun penurunan laba bersih cukup erat kaitannya dengan *stakeholders*. Menurut pandangan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Ikhwani Ratna dan Marwati dijelaskan bahwa laba sangat rentan dengan intervensi manajemen. Laba juga tergantung pada prinsip dan asumsi akuntansi yang digunakan. Manajemen dalam perspektif *efficient* dan *contracting*, akan memilih kebijakan akuntansi yang mampu mengoptimalkan nilai perusahaannya. Sedangkan dalam

---

<sup>26</sup> Pindonta Nalsal dan Yeni Widyawati, “Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Bank Swasta Yang Terdaftar Di BEI,” *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 3, ISSN: 2337-6112, 2015, hlm. 129.

<sup>27</sup> Iwan Triyuwono dan Mohammad As’udi, *Akuntansi ...*, hlm. 1.

perspektif oportunistik manajemen memilih kebijakan akuntansi untuk mengoptimalkan kepentingannya bukan nilai perusahaannya.<sup>28</sup>

### 2.1.2 Teori Agency

*Agency Theory* (teori keagenan) menggambarkan antara dua individu yang berbeda kepentingan yaitu *principal* dan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) dalam Ikhwani Ratna dan Marwati menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) yaitu manajer. Menurut Suseno, teori agensi menjelaskan tentang hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, yang mana manajemen memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham, sehingga sering menimbulkan masalah keagenan atau *agency problems*.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam teori agensi menekankan pada pentingnya penyerahan operasioalitas perusahaan dari *principal* kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik (*agents*). Konsep manejerial yang mengatur hubungan antara pemilik dan pengelola ini menyatakan bahwa setiap pihak mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan sebuah perusahaan.

Hubungan agensi yang didefinisikan oleh Jensen dan Meckling (1976) merupakan sebuah hubungan kontrak yang meminta seseorang melakukan jasa tertentu demi kepentingannya. Oleh karena itu, pemilik perusahaan (*principal*) akan mendelegasikan wewenang atau otoritas untuk mengerjakan sesuatu yang seharusnya dilakukannya kepada orang yang dipilihnya (manajer atau *agents*). Pendelegasian wewenang ini menjadi sebuah keharusan dalam hubungan agensi agar manajer

---

<sup>28</sup> Ikhwani Ratna dan Marwati, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress pada Perusahaan yang Delisting dari Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 1 No. 1, Mei 2018, hlm. 54.

<sup>29</sup> Dedi Irawan dan Nurhadi Kusuma, "Pengaruh Struktur Modan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan", *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, Vol. 17, No. 1, Juni 2019, hlm. 68

mempunyai kesempatan yang luas untuk menjalankan tugasnya, sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakannya kepada pemilik perusahaan. *Agency theory* juga menjelaskan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan yang dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problems*), yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara *principal* dan *agent* (manajer) karena dalam kenyataannya seringkali perusahaan menghadapi masalah yang berbenturan antara tujuan perusahaan dengan tujuan pribadi manajer. Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban untuk selalu transparan dalam melaksanakan kendali perusahaan di bawah *principal*.<sup>30</sup>

Masalah keagenan ini dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan. Mekanisme monitoring yang efektif dalam pengelolaan perusahaan (*corporate governance mechanism*) yaitu: memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer; kepemilikan saham oleh investor institusional karena dianggap sebagai *sophisticated* investor dengan jumlah delapan kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen; dan melalui peran monitoring oleh dewan direksi.<sup>31</sup>

### 2.1.3 Hutang (*Liabilities*)

#### 2.1.3.1 Pengertian Hutang (*Liabilities*)

Hutang dalam akuntansi juga dikenal dengan istilah liabilitas ataupun kewajiban. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain di luar

<sup>30</sup> Ikhwani Ratna dan Marwati, "Analisis ...", hlm. 55.

<sup>31</sup> Devi Agusta Anggraini, "Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Sub Sektor Property yang Terdaftar di ISSI," Skripsi, Palembang: FEBI, UIN Raden Fatah, 2018, hlm. 13-14.

perusahaan pada suatu periode. Dalam FASB (*Financial Accounting Standar Board*) dijelaskan bahwa hutang adalah:

“pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang timbul akibat adanya kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalu.”<sup>32</sup>

Haryono Jusup mengungkapkan hutang sebagai:

“kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa, di waktu yang akan datang.”<sup>33</sup>

Menurut Hanafi dalam Maulana dan Ayang, hutang adalah:

“pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer *asset* atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu.”<sup>34</sup>

Sedangkan, Munawir berpendapat bahwa hutang adalah:

“semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor.”<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hutang (*liabilities*) adalah sumber dana perusahaan yang bersumber dari entitas lain sehingga menjadi kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sebagai akibat dari transaksi masa lampau dan diselesaikan dengan adanya arus kas keluar dari keuangan perusahaan pada periode ini ataupun periode mendatang.

---

<sup>32</sup> Suwardjono, *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2014, hlm. 305.

<sup>33</sup> Haryono Jusup, *Dasar-Dasar Akuntansi JILID 2*, Yogyakarta: STIE YKPN, 2011, hlm. 197.

<sup>34</sup> Zefri Maulana dan Ayang Fhonna Safa, “Pengaruh Hutang Jangka Pendek dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Mandiri Tbk”, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, hlm. 46.

<sup>35</sup> Ibid.

### 2.1.3.2 Klasifikasi Hutang

Berdasarkan jangka waktunya, hutang terbagi atas hutang jangka pendek (*short-term liabilities*) dan hutang jangka panjang (*long-term liabilities*).

#### 1. Hutang Jangka Pendek

*Short-Term Liabilities* atau hutang jangka pendek biasa disebut juga sebagai hutang lancar (*current liabilities*). *Short-Term Liabilities* adalah kewajiban lancar yang jangka waktunya kurang dari satu tahun. Dengan ungkapan lain, kewajiban lancar adalah utang yang harus dilunasi dalam satu siklus operasi normal entitas atau dalam jangka waktu satu tahun dengan menggunakan *asset* lancar yang dimiliki entitas. Menurut Fahmi dalam Rosita dan Gantino, hutang ini dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan entitas yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda.<sup>36</sup>

Hutang jangka pendek umumnya meliputi hal-hal berikut:

- 1) Hutang dagang maupun usaha atau *accounts payable* adalah hutang yang terjadi karena entitas belum melakukan pembayaran tetapi barang atau jasa telah diterima oleh entitas.
- 2) Hutang wesel atau *notes receivable* adalah sejumlah nilai yang harus dibayar oleh entitas pada periode mendatang dengan kesepakatan tertulis dalam bentuk wesel.
- 3) Biaya yang masih harus dibayar atau *accrued expense* adalah beban perusahaan yang belum dibayar pada

---

<sup>36</sup> Maizah Rosita dan Rilla Gantino, "Pengaruh Utang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan *Food & Beverages* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 1246.

- suatu periode sehingga masih harus dilunasi pada periode mendatang, seperti hutang gaji dan utang bunga.
- 4) Pendapatan diterima dimuka adalah penghasilan yang telah diterima oleh entitas tetapi barang ataupun jasa dari entitas belum diberikan.
  - 5) Hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo adalah keseluruhan maupun sebagian hutang jangka panjang yang pembayarannya harus segera dilakukan.
  - 6) Hutang pajak adalah hutang entitas kepada negara baik berupa pajak penghasilan ataupun lainnya yang belum dibayar entitas sehingga harus segera diselesaikan.

## 2. Hutang Jangka Panjang

*Long-term liabilities* juga biasa disebut dengan hutang tidak lancar. Hutang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. Menurut Munawir dalam Maulana dan Safa, hutang jangka panjang adalah kewajiban atau hutang entitas yang memiliki jangka waktu pembayaran lebih lama yakni lebih dari satu periode akuntansi. Umumnya, hutang ini dimanfaatkan untuk mendanai ekspansi atau perluasan usaha maupun kegiatan lain yang sifatnya membutuhkan jumlah modal yang besar.<sup>37</sup> Hutang yang termasuk ke dalam hutang jangka panjang yaitu hutang obligasi, hutang hipotik (kewajiban jangka panjang yang dijamin dengan aset tetap tertentu), dan hutang jangka panjang lainnya.

---

<sup>37</sup> Zefri Maulana dan Ayang Fhonna Safa, "Pengaruh ...", hlm. 47.

### 2.1.3.3 Konsep Hutang dalam Perspektif Islam

Hutang dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-dayn* atau jamaknya *al-duyun* dan *al-qardh*. Namun, *dayn* dan *qardh* tidak diartikan sama persis, keduanya memiliki perbedaan. Nurul Huda mengartikan *dayn* sebagai sesuatu yang harus diselesaikan atau dilunasi. Hal yang membedakan adalah adanya jangka waktu atau tempo dalam pengembalian utang. *Dayn* mensyaratkan jangka waktu atau tempo dalam pengembalian utangnya, sedangkan *qardh* tidak demikian. Menurut Abu Al-Kasim dalam Aziz dan Ramdansyah, kata *dayn* bermakna berhutang atau memberi utang, sedangkan kata *qardh* bermakna sesuatu yang dibayarkan kepada orang lain dari harta dengan syarat mengembalikannya sebagai gantinya.<sup>38</sup> Dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hanafiyah mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:

“*Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mistli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain. *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mistli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”<sup>39</sup>

Sedangkan, hutang menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

“penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam dalam jangka waktu tertentu.”<sup>40</sup>

Dengan demikian, hutang (*qardh*) adalah sebagian harta yang diberikan kepada orang lain yang dapat ditagih sehingga harus dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama atau tanpa imbalan. Pada dasarnya hukum asal

---

<sup>38</sup> Abdul Aziz dan Ramdansyah, “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, hlm. 125.

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm 272.

<sup>40</sup> Abdul Aziz dan Ramdansyah, “Esensi ..., hlm. 125.

hutang dalam syariat Islam adalah diperbolehkan. Karena dalam akad hutang piutang terdapat unsur *ta'awun* atau saling tolong menolong. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an dalam Q.S Al-Maidah (5): 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ شَدِيدَ الْعِقَابِ

*Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*<sup>41</sup>

Ayat tersebut mengandung makna bahwa sesama muslim dianjurkan untuk saling membantu termasuk dalam *muamalah*. Keberadaan akad hutang piutang dapat membantu orang lain mengatasi kesulitan. Meskipun hutang piutang diperbolehkan dalam syariat Islam, namun dalam menerapkannya umat Islam harus berhati-hati karena hutang dapat menjadi beban berat bagi orang yang berhutang. Oleh sebab itu, dalam hutang-piutang sangat dianjurkan untuk mempertimbangkan antara manfaat yang akan diperoleh dengan *mudharat* yang ada, pemberian penangguhan waktu bagi orang yang berhutang agar mampu melunasi hutangnya maupun keikhlasan pemberi hutang agar hutang tersebut tidak dilunasi.<sup>42</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim telah dijelaskan bahwasannya setiap hutang wajib dilunasi sesuai dengan nilai dari hutang yang telah dipinjam. Akan menjadi

<sup>41</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran ...*, hlm. 141.

<sup>42</sup> Lisma Yanti Harahap et.al, “Hukum Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Dengan Menggunakan Tenaga Menurut Imam Malik (Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan),” *Islamic Business Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 11.

nilai kebaikan bagi orang yang melunasi hutangnya apabila ia melebihi pengembalian hutang dari yang seharusnya atas kemauannya sendiri. Seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Saw dalam sabda berikut:

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبِي رَافِعَ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيْرًا رَبَاعِيًّا فَقَالَ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خَيْرًا النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. (رواه مسلم)

*Artinya: “dari Abu Rafi’i ra. Bahwasannya Nabi saw pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang. Ternyata beliau menerima seekor unta untuk zakat. Kemudian Nabi saw meyuruh Abu Rafi’i berkata, “aku tidak menemukan kembali kecuali yang baik dan pilihan yang sudah berumur empat” maka Rasulluallah bersabda: “berikanlah kepadanya karena sebaik-baik manusia ialah yang paling baik melunasi hutang.” (H.R Muslim No. 880)<sup>43</sup>*

Hadits tersebut juga mengandung makna bahwa tiap-tiap hutang wajib segera dilunasi tanpa menundanya apabila orang yang berhutang telah mampu. Menunda pelunasan hutang dalam sabda Rasulullah bahkan termasuk sebuah kezaliman. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

<sup>43</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III*, Indonesia: Maktabat Dahlan, t.th, hlm.1223.

*Artinya: “Telah menceritakan kepada ‘Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada Malik, dari Abi Zanad, dari A’raj, dari Abi Hurairah ra: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kedzaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti. (HR. Bukhari)<sup>44</sup>*

Hadits tersebut mengandung perintah untuk menyetor pembayaran hutang sekaligus merupakan peringatan bahwa menunda pembayaran hutang termasuk perbuatan yang dzalim. Oleh karena itu, seseorang yang berhutang apabila sudah mampu untuk membayar kewajibannya tersebut maka tidak boleh menunda-nunda pembayaran hutang.

#### **2.1.3.4 Kebijakan Hutang**

Sumber pendanaan bagi perusahaan dapat diperoleh dari modal internal maupun external. Keputusan pembiayaan atau pendanaan dapat memengaruhi struktur modal dari perusahaan tersebut. Kebijakan hutang merupakan salah satu dari kebijakan pendanaan yang dapat diambil oleh manajemen sehingga menjadi keputusan yang sangat penting. Kebijakan hutang menurut Yeniatie dan Destriana adalah kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan dalam rangka mendapatkan sumber pembiayaan untuk dimanfaatkan dalam membiayai aktivitas operasional perusahaan. Selain itu kebijakan hutang berfungsi juga sebagai mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail al Bukhari, *al-Jami’* ..., hlm. 94.

<sup>45</sup> Yeniatie dan Nicken Destriana, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kebijakan Hutang pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12, No. 1, April 2010, hlm. 2.

Brigham dalam Dian Maruli Tuas Pohan mengungkapkan bahwa pasar akan memberikan respon positif pada perusahaan yang meiliki kemampuan untuk membayar kewajiban di masa mendatang atau adanya risiko bisnis yang rendah dalam peningkatan hutang.

#### **2.1.3.5 Debt To Equity Ratio**

*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan salah satu rasio *leverage*. Menurut Kasmir *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang berguna untuk menilai hutang dengan ekuitas sehingga mampu mengetahui setiap modal sendiri yang dijadikan sebagai jaminan hutang atau untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Semakin rendah nilai *Debt to Equity Ratio* berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* berarti semakin tinggi risikonya bagi perusahaan karena nilai pendanaan yang bersumber dari hutang lebih besar dari modal sendiri. Menurut Fahmi dalam Deri Putra Pratama menjelaskan bahwa yang perlu dipahami dalam *Debt to Equity Ratio*, tidak ada batasan berapa *Debt to Equity Ratio* (DER) yang aman bagi suatu perusahaan, namun untuk konservatif biasanya jika melewati angka 66% sudah dianggap berisiko.<sup>46</sup> Hal ini dapat menimbulkan risiko yang cukup besar bagi perusahaan jika pada saat jatuh tempo tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut sehingga akan berdampak pada kelangsungan operasi perusahaan. Selain itu, perusahaan akan menghadapi biaya bunga yang tinggi sehingga dapat menurunkan laba

---

<sup>46</sup> Dea Nony Agustina dan Mulyadi, "Pengaruh *Debt To Equity Ratio*, *Total Asset Turn Over*, *Current Ratio*, Dan *Net Profit Margin* Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia," *Advance: Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, July 2019, hlm. 107.

perusahaan.<sup>47</sup> Berikut adalah rumus untuk menentukan nilai *Debt to Equity Ratio* (DER):

$$\text{Debt to Equity Ratio: } \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

## 2.1.4 Ruang Lingkup Pajak

### 2.1.4.1 Definisi dan Fungsi Pajak

Karianton Tampubolon mendefinisikan pajak melalui dua aspek yaitu aspek ekonomis dan aspek hukum.<sup>48</sup> Dilihat dari aspek ekonomis, pajak adalah:

“peralihan kekayaan dari swasta kepada sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.”

Sedangkan, pajak dari aspek hukum adalah:

“perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar uang kepada negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.”

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah:

“kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

---

<sup>47</sup> Deri Putra Pratama, “Analisis Pengaruh *Debt To Equity Ratio*, *Current Ratio*, *Inventory TurnOver* Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Manufaktur (Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2015-2017),” Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019, hlm. 107.

<sup>48</sup> Karianton Tampubolon, *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak: Praktik Akuntansi Perpajakan, PPh Badan, Manajemen Pajak, dan Pemeriksaan Pajak*, Jakarta: Indeks, 2017, hlm. 2.

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”<sup>49</sup>

Sedangkan, menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1):

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat atau masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa yang digunakan untuk membiayai keperluan negara berkaitan dengan kemakmuran rakyat tanpa ada hasil yang bisa dirasakan secara langsung. Oleh karena itu, pajak memiliki fungsi-fungsi berikut:<sup>50</sup>

- a. *Budgetair* atau fungsi anggaran maksudnya pajak memiliki fungsi sebagai salah satu sumber penghasilan pemerintah dalam membiayai pengeluarannya.
- b. *Regulator* atau fungsi mengatur maksudnya pajak digunakan sebagai alat atau sarana untuk melaksanakan serta mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- c. Fungsi stabilitas maksudnya pajak digunakan sebagai alat untuk menjaga kestabilan harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi.

#### 2.1.4.2 Konsep Pajak Menurut Yusuf Qardawi

Umat Islam mempunyai 2 (dua) kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan beragama dan bernegara, yakni

<sup>49</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: ANDI, 2016, hlm. 3.

<sup>50</sup> Karianton Tampubolon, *Akuntansi ...*, hlm. 4.

menunaikan zakat dan menyetor pajak. Yusuf Qardawi mengungkapkan bahwa merupakan dua hal yang berbeda antara zakat dan pajak yang seharusnya tidak disatukan, sehingga bagi seorang muslim selain menunaikan kewajiban zakat diperbolehkan memenuhi kewajiban pajak. Apabila seorang muslim telah memenuhi kewajiban pajak, maka ia tetap harus memenuhi kewajiban zakat. Hal tersebut dikarenakan zakat merupakan kewajiban seorang muslim kepada Allah SWT, sedangkan pajak merupakan kewajiban warga negara pada negaranya. Perbedaan zakat dengan pajak menurut Yusuf Qardawi dapat dilihat dari hal-hal berikut:<sup>51</sup>

a. Nama dan etika

Zakat memiliki arti suci, berkah dan tumbuh. Sedangkan, pajak yang berasal dari kata *dhariba*, memiliki arti utang, upeti, pajak tanah yakni sesuatu yang wajib dibayar atau beban.

b. Hakikat dan tujuannya

Zakat merupakan kewajiban untuk setiap muslim sebagai wujud syukur dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan pajak terkait dengan kewajiban warga negara sesuai dengan ketentuan wajib pajak.

c. Kelestarian dan kelangsungannya

Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap, pasti dan terus menerus (*continue*). Sedangkan pajak, tidak memiliki sifat yang tetap dan terus menerus sehingga dapat diubah maupun ditiadakan oleh pemerintah.

d. Distribusinya

---

<sup>51</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi*, Malang: UIN-Malang Press, 2008, hlm. 104 -106.

Zakat dibagikan kepada golongan-golongan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S at-Taubah (9): 60, sedangkan pajak digunakan untuk pengeluaran umum negara.

e. Hubungannya dengan penguasa

Zakat merupakan hubungan antara *muzaqii* dengan Tuhannya. Sedangkan, pajak ialah hubungan antara wajib pajak dengan pemerintah. Pajak dapat dipungut dan dikurangi oleh pemerintah dalam suatu kasus. Rakyat tidak mendapatkan sanksi denda apabila pemerintah tidak menagih pungutan. Sedangkan zakat merupakan hubungan antara wajib zakat (*muzaqii*) dengan Tuhannya. Apabila pemerintah tidak menagih pungutan zakat pada masyarakat muslim serta tidak membagikannya, maka masyarakat muslim tetap wajib mengeluarkan zakat dan membagikannya sendiri kepada yang berhak menerimanya.

f. Maksud dan tujuan

Zakat memiliki tujuan yang lebih tinggi dari pajak, yaitu tujuan spiritual, moral dan sosial. Pajak bertujuan mengisi kas negara untuk pembangunan, kemudian setelah terjadi perubahan sosial, ekonomi dan politik, selanjutnya tujuan pajak antara lain untuk mengatasi kesenjangan sosial.

g. Objek persentase dan pemanfaatannya

Zakat memiliki batas *nisab* (kadar minimal) dan presentase yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang tidak bisa diubah, begitu juga pemanfaatannya telah diperuntukkan bagi delapan *ashnaf*, sedangkan besarnya pungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta objek pajaknya. Pungutan pajak dapat digunakan untuk kepentingan seluruh sektor kehidupan.

### 2.1.4.3 Kewajiban Membayar Pajak

Memenuhi kewajiban pajak kepada negara yang telah dibebankan pada warganya menurut Ilfi Nur Diana dalam Hadis-hadis Ekonomi merupakan sebuah kewajiban bukan hanya sekedar kebolehan. Alasannya ialah:<sup>52</sup>

- a. Taat kepada *ulul amri* yang taat pada ajaran Islam adalah kewajiban sesuai dengan Q.S An-Nisa (4): 59 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa (4): 59)<sup>53</sup>

Dengan adanya ayat ini, maka apabila pemerintah mewajibkan pajak yang akan digunakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat, maka sebagai warga negara harus menaatinya.

- b. Dalam ketakwaan dan kebaikan, kekompakan antar sesama muslim dan sesama manusia merupakan sebuah kewajiban. Membayar pajak menjadi wajib apabila dana pajak tersebut

<sup>52</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis ...*, hlm. 102.

<sup>53</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran ...*, hlm. 114.

digunakan untuk kepentingan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, sarana transportasi maupun lainnya.

- c. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Fatimah binti Qais: Turmudzi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدْوَيْهِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقْرَةِ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ الْآيَةَ

Artinya: “Nabi saw ditanya tentang zakat, maka ia bersabda: “Sesungguhnya pada harta itu ada kewajiban selain zakat.”

(matan lain: Ibnu Majah 1779 Darimi 1581).

Hadis ini menjelaskan bahwa terdapat kewajiban lain yang melekat dalam harta yang kita miliki selain zakat, yakni kewajiban sosial lain yang dianjurkan dalam Islam. Kewajiban tersebut antara lain menunaikan sedekah sunnah, hibah, waqaf, ataupun infaq. Hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam sesuai kemampuan yang dimiliki sehingga tidak terbatas jumlahnya serta pemanfaatannya pun sangat fleksibel dan luas.<sup>54</sup> Membayar pajak kepada pemerintah yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat juga termasuk dalam kewajiban selain zakat yang dimaksud.

### 2.1.5 Akuntansi Pajak

Pada hakikatnya, syariat Islam telah menetapkan kaidah hukum yang mengatur tentang akuntansi (operasional pembukuan), muamalah

<sup>54</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis...*, hlm. 103.

(transaksi sosial) atau perniagaan. Terkait hal ini, Allah telah menjelaskannya dalam Q.S al-Baqarah (2): 282 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
 رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب  
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
 أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ  
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

*orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seseorang lupa maka seorang lagi mengikatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>55</sup>*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perlu untuk mencatat transaksi hutang piutang oleh pihak yang saling berutang atau salah satu diantara keduanya sebagai bukti apabila terjadi pengingkaran. Hal tersebut berarti bahwa peran akuntansi (pencatatan) sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi, termasuk akuntansi tentang pajak.

Fungsi perpajakan dalam penerapannya sebagai kebijakan pemerintah telah menciptakan akuntansi pajak yang memiliki prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Dalam akuntansi pajak, penggunaan prinsip-prinsip dasar akuntansi diperbolehkan meskipun terdapat tujuan pelaporan keuangan fiskal dan karakteristik yang berbeda. Hal ini dikarenakan akuntansi komersial menggunakan prinsip-prinsip dasar yang bersifat netral sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh akuntansi tidak memihak.

Pasal 13 UU Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa kewajiban pembukuan harus dilakukan sesuai dengan prinsip dasar pembukuan yang berlaku atau dengan cara yang umum digunakan di Indonesia, seperti menggunakan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Hubungan akuntansi komersial

---

<sup>55</sup> Kementrian Agama RI, *AL-Quran ...*, hlm. 59.

dengan akuntansi pajak bermula dari prinsip dasar akuntansi yang kemudian diikuti dengan prinsip dasar akuntansi dalam undang-undang perpajakan.<sup>56</sup>

SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan sekaligus pembayaran pajak. Kesalahan dalam pengisian SPT dapat menyebabkan adanya pemeriksaan oleh pegawai pajak sehingga dapat mengakibatkan Wajib Pajak harus membayar pajak terutang yang lebih besar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perpajakan maupun akuntansi pajak sangat penting guna menekan kesalahan dalam pencatatan SPT maupun rekonsiliasi fiskal.<sup>57</sup>

## 2.1.6 Pajak penghasilan

### 2.1.6.1 Pengertian Penghasilan

*Income* (penghasilan) merupakan bertambahnya *asset* atau turunnya *liabilities* yang menyebabkan ekuitas yang bukan bersumber dari kontribusi penanaman modal bertambah. Penghasilan dalam akuntansi meliputi *gains* (keuntungan) dan *revenues* (pendapatan). Pendapatan atau *revenues* merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan perusahaan seperti penjualan, bunga, dividen, penghasilan atas jasa (*fees*), sewa, maupun royalti. Dalam perpajakan, penghasilan diartikan sebagai “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima maupun diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.” Sesuai peraturan yang berlaku, wajib pajak akan dikenai pajak atas setiap penghasilan yang diterimanya karena penghasilan memiliki pengertian yang luas dalam perpajakan. Oleh sebab itu, dalam menentukan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak dapat dilihat dari banyaknya tambahan

---

<sup>56</sup> Waluyo, *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hlm. 43

<sup>57</sup> Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi ...*, hlm. 10.

kemampuan atau manfaat ekonomis yang diperoleh wajib pajak.<sup>58</sup>

Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis penghasilan dalam perpajakan. Apabila dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut<sup>59</sup>:

- a. Penghasilan yang berasal dari kegiatan dan usaha.
- b. Penghasilan yang berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- c. Penghasilan yang berasal dari modal, dapat berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak, seperti bunga, sewa, dividen, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang terabaikan.
- d. Penghasilan atau pendapatan lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Sedangkan, penghasilan dapat digunakan untuk kegiatan konsumsi maupun tabungan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, apabila dilihat dari penggunaannya.

#### **2.1.6.2 Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan merupakan besaran pajak yang menjadi beban Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh ataupun diterima dalam suatu tahun pajak. Sedangkan, Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan sehingga menjadi sasaran agar dikenai Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan diatur dalam UU

---

<sup>58</sup> Karianton Tampubolon, *Akuntansi ...*, hlm. 69.

<sup>59</sup> Karianton Tampubolon, *Akuntansi ...*, hlm. 70.

No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Subjek Pajak terdiri atas subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan, subjek pajak warisan uang belum terbagi, dan subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT). Dalam undang-undang tersebut, Subjek Pajak disebut juga dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas setiap penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak atau dikenai pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajaknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak yang dimaksud adalah tahun takwim, namun sepanjang tahun buku perusahaan meliputi jangka waktu 12 bulan maka Wajib Pajak tetap dapat menggunakannya.<sup>60</sup>

Selain UU No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan juga diatur dalam PSAK No. 46 dan SAK ETAP pada BAB 24. Dalam SAK ETAP ini dijelaskan bahwa seluruh pajak domestik dan luar negeri merupakan pajak penghasilan sebagai dasar Penghasilan Kena Pajak. Kedua aturan tersebut juga mengungkapkan mengenai kewajiban entitas atau Wajib Pajak untuk mengakui kewajiban atas keseluruhan pajak penghasilan periode saat ini maupun periode sebelumnya yang terutang (belum dibayar). Apabila jumlah pajak penghasilan yang telah dilunasi untuk periode saat ini dan sebelumnya lebih besar dari jumlah yang terutang pada periode tersebut, perusahaan harus mengakui kelebihannya sebagai aset dan harus mengungkapkannya secara terpisah setiap komponen utama beban pajak penghasilan dalam pelaporan atas pajak penghasilan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Rahmat Hidayat Lubis, *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Aplikasi*, Yogyakarta: ANDI, 2018, hlm. 83.

<sup>61</sup> Waluyo, *Akuntansi ...*, hlm. 43.

### 2.1.6.3 Perhitungan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif PPh 17 ayat (1b).

$$\text{PPh Terutang} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{Tarif PPh}$$

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah selisih yang diperoleh dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang boleh digunakan sebagai pengurang PKP dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak. Penghasilan kena pajak dapat dihitung dari laba komersial dikurangi dengan koreksi fiskal. Berikut adalah tarif pajak yang digunakan untuk masing-masing Wajib Pajak sesuai Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:<sup>62</sup>

- a. Tarif PPh Pasal 17 untuk WP Orang Pribadi dalam negeri, yaitu:

**Tabel 2.1 Tarif Pajak WP OP**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
≤ Rp 50.000.000	5%
Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
>Rp 500.000.000	30%

- b. Tarif PPh Pasal 17 bagi WP badan dalam negeri dan BUT adalah sebesar 28% pada tahun 2009, kemudian menjadi 25% dan mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
- c. Tarif PPh 31E bagi WP badan yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 50 miliar Rupiah memperoleh fasilitas

<sup>62</sup> Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi ...*, hlm. 225.

pengurangan tarif pajak 50% dari tarif PPh Pasal 17 yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar Rupiah.

- d. Tarif PPh Pasal 17 bagi WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di BEI serta memenuhi persyaratan tertentu lainnya (PP Nomor 81 Tahun 2007, PMK-238/PMK.03/2008, SE-42/PJ/2009), adalah 5% lebih rendah. Untuk tahun 2009 dari 28% menjadi 23% dan mulai tahun pajak 2010 sebesar 25% menjadi 20%.

Dalam pajak penghasilan, apabila suatu perusahaan mengalami kerugian pada satu tahun pajak, maka kerugian tersebut dapat dikompensasi dalam kompensasi kerugian. Kompensasi kerugian dilakukan untuk kerugian fiskal suatu tahun pajak dengan cara dikompensasikan dengan penghasilan atau penghasilan lainnya (kompensasi horizontal) mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Kompensasi kerugian hanya boleh dijalankan oleh Wajib Pajak (WP) Badan atau Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan. Meskipun demikian, suatu penghasilan tidak diizinkan untuk digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif umum apabila jenis penghasilan tersebut telah dikenai tarif pajak yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak.<sup>63</sup>

### **2.1.7 Akuntansi Pajak Penghasilan Basis PSAK No. 46**

PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan bermaksud untuk mengatur perlakuan akuntansi bagi Pajak Penghasilan, yaitu cara atau

---

<sup>63</sup> Karianton Tampubolon, *Akuntansi ...*, hlm. 70.

metode yang digunakan dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak untuk periode saat ini dan berikutnya bagi:

1. Pelunasan nilai tercatat *liabilities* atau nilai tercatat *asset* yang diakui dalam neraca perusahaan.
2. Transaksi ataupun kejadian lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan perusahaan.

Perusahaan harus mengakui liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) jika kemungkinan perolehan *asset* ataupun pelunasan *liabilities* memberi dampak pembayaran pajak untuk periode berikutnya menjadi lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan yang tidak memiliki konsekuensi pajak.<sup>64</sup>

Sebagaimana pajak penghasilan telah diatur dalam PSAK No. 46 dimana dalam menyajikan akun tersebut harus menggunakan dasar akrual. Dasar akrual adalah prinsip yang mengatur pajak penghasilan terutang atau kurang bayar dan pajak lebih bayar dalam masa pajak, mengakui *liabilitas* dan *asset* pajak tangguhan terhadap konsekuensi pajak periode berikutnya, dan atas transaksi ataupun kejadian yang telah diakui sebagai unsur laba perusahaan namun belum diakui sebagai laba fiskal maupun sebaliknya. Dasar akrual digunakan karena *self assessment system* diterapkan sebagai dasar pemungutan pajak setra adanya faktor kepastian peraturan pajak. Prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan dalam PSAK No. 46 adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Pajak penghasilan yang kurang bayar untuk tahun berjalan atau terutang diakui sebagai liabilitas pajak kini (*current tax liability*), sedangkan pajak penghasilan yang lebih bayar untuk tahun berjalan diakui sebagai aset pajak kini (*current tax asset*).
2. Konsekuensi pajak periode mendatang yang dapat diatribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary*

---

<sup>64</sup> Waluyo, *Akuntansi ...*, hlm. 278.

<sup>65</sup> Waluyo, *Akuntansi ...*, hlm. 279.

*differences*) diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, sedangkan efek perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductable temporary differences*) dan sisa kerugian yang belum dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan.

3. Pengakuan liabilitas dan aset pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku, efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi dikemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasi.
4. Pada setiap tanggal neraca harus dilakukan penilaian (kembali) atas *asset* pajak tangguhan, terkait dengan pemulihan *asset* pajak tangguhan dapat direalisasikan pada periode berikutnya atau tidak.

Sesuai uraian di atas, maka PSAK No. 46 mengatur perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan yang menekankan pada:<sup>66</sup>

1. Pertanggungjawaban atas konsekuensi pajak pada periode saat ini atau periode berikutnya dalam:
  - a. Pemilihan lain nilai *asset* dan pelunasan nilai liabilitas tercatat yang disajikan dalam neraca.
  - b. Transaksi atau peristiwa lain pada periode saat ini yang diakui dan disajikan dalam laporan keuangan komersial.
2. Pengakuan aset pajak tangguhan yang berasal dari sisa kerugian yang belum dikompensasi dan penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan komersial.

### 2.1.8 Pajak Kini

Erly Suandy mengungkapkan bahwa pajak kini (*current tax*) merupakan jumlah pajak terutang yang perlu dilunasi oleh Wajib Pajak. Jumlah pajak ini ditentukan sesuai dengan tarif pajak dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak yang dihitung sendiri oleh Wajib Pajak dan tercantum dalam SPT.<sup>67</sup> Laba fiskal adalah keuntungan komersial yang

---

<sup>66</sup> Waluyo, *Akuntansi ...*, hlm. 280.

<sup>67</sup> Erly Suandy, *Perencanaan ...*, hlm.107.

telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku karena sebelumnya telah dikoreksi. Laba fiskal tersebut didapatkan melalui laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi fiskal terhadap laba bersih sebelum pajak. Koreksi fiskal dijalankan karena dalam peraturan perpajakan yang berlaku dengan SAK terdapat perbedaan dalam mengakui pendapatan maupun biaya.

Pengakuan pajak kini diatur dalam PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan. Pajak kini diakui sebagai kewajiban apabila jumlah pajak terutang dalam periode berjalan belum dilunasi. Pajak kini diakui sebagai aktiva apabila jumlah pajak yang dilunasi untuk periode berjalan maupun periode sebelumnya lebih besar dari jumlah pajak terutang untuk periode tersebut. Selisih lebih dari kedua hal tersebut yang diakui sebagai aktiva.<sup>68</sup>

### 2.1.9 Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah besaran pajak penghasilan yang masih harus ditanggung perusahaan untuk periode mendatang yang terjadi akibat adanya perbedaan waktu (*temporer*) dalam mengakui penghasilan ataupun biaya antara ketentuan akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Pajak tangguhan juga dapat diartikan sebagai jumlah pajak penghasilan yang dapat ditunda pembayarannya sampai waktu yang diperbolehkan akibat terdapat perbedaan temporer. Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah aset atau kewajiban yang tercatat dengan Dasar Pengenaan Pajaknya.

Perbedaan temporer yang timbul dapat berupa perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) atau perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*). *Deductible temporary differences* merupakan perbedaan sementara yang mengakibatkan suatu jumlah boleh dikurangkan (*deductible*

---

<sup>68</sup> Edy Suprianto, *Akuntansi Perpajakan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 169.

*amounts*) dalam perhitungan laba fiskal untuk periode berikutnya ketika nilai tercatat aktiva terpulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*). Sedangkan, *taxable temporary differences* adalah perbedaan temporer yang mengakibatkan suatu jumlah menjadi kena pajak (*taxable amounts*) dalam perhitungan laba fiskal untuk periode berikutnya ketika nilai tercatat aktivanya terpulihkan (*recovered*) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).<sup>69</sup>

Moh. Zain mengungkapkan bahwa dengan berlakunya PSAK No. 46, perusahaan atau entitas memiliki sebuah kewajiban untuk menghitung dan mengakui *deffered taxes* atau pajak tangguhan atas *future tax effect* atau efek pajak masa depan dengan memakai pendekatan *the assets and liability method* atau metode aset dan kewajiban.<sup>70</sup>

### **2.1.8.1 Penilaian dan Pengakuan Pajak Tangguhan**

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk aktiva maupun pasiva telah diatur dalam PSAK No. 46. Dasar Pengenaan Pajak aktiva merupakan jumlah yang boleh dikurangi untuk keperluan fiskal pada setiap PKP yang akan diperoleh suatu perusahaan pada saat mengembalikan nilai tercatat aktiva tersebut. Jika suatu penghasilan tidak terkena pajak maka DPP aktiva sama dengan nilai tercatat aktiva atau sesuai dengan penghasilan maupun biaya itu sendiri. Ketika biaya atau penghasilan diakui dengan metode *cash basis* maka besarnya DPP aktiva sama dengan nol karena saat menerima penghasilan tersebut telah diakui, sedangkan ketika diakui dengan metode *accrual basis* maka nilai DPPnya sama dengan nilai tercatat dari penghasilan atau biaya. DPP kewajiban merupakan nilai tercatat dalam

---

<sup>69</sup> Edy Suprianto, *Akuntansi ...*, hlm. 167.

<sup>70</sup> Achmad Hidayat, "Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini Dan Pajak Tangguhan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Agribisnis Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2012-2014", *Jurnal Lentera Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, hlm. 5.

kewajiban yang boleh dikurangi dengan jumlah yang boleh dikurangkan di kemudian hari<sup>71</sup>

Pengakuan pajak tangguhan dapat dilakukan dengan mengakui jumlah pajak tersebut sebagai aktiva pajak tangguhan maupun pasiva pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) berdasarkan PSAK No. 46, memiliki maksud bahwa kewajiban pajak tangguhan diakui apabila pada periode mendatang terjadi pembayaran pajak yang lebih besar. *Deferred tax liabilities* terjadi jika beda waktu menghasilkan koreksi negatif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.<sup>72</sup>

Sedangkan, aktiva pajak tangguhan (*deferred tax asset*) merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan (*recoverable*) pada periode berikutnya sebagai akibat munculnya perbedaan sementara yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.<sup>73</sup> Artinya aktiva pajak tangguhan diakui apabila pada periode mendatang jumlah pajak yang harus dibayar lebih kecil karena ada aset yang nilainya dapat dipulihkan. *Deferred tax asset* terjadi apabila beda temporer menimbulkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.<sup>74</sup> *Deferred tax liabilities* ataupun *deferred tax asset* yang diakui dapat dihitung dengan mengalikan beda waktu atau temporer antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal atau rugi fiskal yang dapat dikompensasi dengan tarif pajak yang berlaku.<sup>75</sup>

---

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi ...*, hlm. 245.

<sup>73</sup> Edy Suprianto, *Akuntansi ...*, hlm. 166.

<sup>74</sup> Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi ...*, hlm. 244.

<sup>75</sup> Ibid.

### 2.1.8.2 Pencatatan dan Penyajian

Aset pajak tangguhan dapat dicatat dengan jurnal berikut:

Aset pajak tangguhan	xxx	
		Pendapatan pajak tangguhan
		xxx

Sedangkan, untuk mencatat kewajiban pajak tangguhan dapat dilakukan dengan jurnal berikut:

Beban pajak tangguhan	xxx	
		Kewajiban pajak tangguhan
		xxx

Penyajian pajak tangguhan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut<sup>76</sup>:

- Dalam neraca, *asset* dan kewajiban pajak tangguhan disajikan secara terpisah atau tersendiri dari *asset* dan kewajiban lainnya.
- Dibedakan menjadi *prepaid tax* atau *asset* pajak kini dan *tax payable* atau kewajiban pajak kini.
- Tidak diperbolehkan disajikan menjadi *asset* atau kewajiban lancar.
- Jumlah bersih dari *asset* pajak kini yang sudah dikompensasikan (*offset*) dengan kewajiban pajak kini harus disajikan dalam neraca.

Penghasilan Neto Fiskal	xxx
-/. Kompensasi Kerugian	(xxx)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	<u>xxx</u>

<sup>76</sup> Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi ...*, hlm. 245.

- e. Dalam laporan laba/rugi, beban (penghasilan) pajak yang ada kaitannya dengan keuntungan atau kerugian dari aktivitas normal perusahaan harus disajikan tersendiri.
- f. Aset pajak tangguhan tidak boleh disajikan dengan akun tagihan restitusi PPh dan kewajiban tangguhan juga tidak boleh disajikan dengan utang PPh 29 atau harus disajikan terpisah.
- g. PPh bersifat final:
  - 1. Tidak boleh diakui sebagai *asset* atau kewajiban pajak tangguhan ketika ada perbedaan dari Dasar Pengenaan Pajak untuk nilai *asset* atau kewajiban yang berkaitan dengan PPh final.
  - 2. Beban pajak harus diakui pada periode saat ini (berjalan) jika suatu penghasilan telah dikenakan PPh final.
  - 3. Pajak dibayar di muka dan utang pajak diakui apabila pada perhitungan laba rugi terjadi selisih antara jumlah PPh final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini.
  - 4. Harus disajikan secara terpisah antara akun PPh final dibayar di muka dengan PPh final yang masih harus dibayar.
- h. Pelakuan akuntansi untuk hal khusus:
  - 1. Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak harus dibebankan sebagai pendapatan atau beban lain-lain pada Laporan Laba/Rugi Periode Berjalan.
  - 2. Apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka pembebanannya ditangguhkan.
  - 3. Apabila terdapat kesalahan mendasar, maka perlakuan akuntansinya mengacu pada PSAK 25 tentang Laba atau

Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Penyajian pajak kini dan pajak tangguhan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

Laba sebelum PPh		xxx
PPh:		
Pajak Kini	xxx	
Pajak Tangguhan	xxx	
		xxx
Laba setelah PPh		xxx

#### 2.1.10 Perbedaan Laba/Rugi Akuntansi (Komersial) dengan Laba/Rugi Fiskal

Laporan fiskal disusun berdasarkan pada penggunaan *taxability-deductibility mechanism*, hal inilah yang menjadi pembeda antara laporan fiskal dengan laporan keuangan komersial. Prinsip dapat dipajaki atau *taxable* dan dapat dikurangi atau *deductible* adalah suatu prinsip yang umum digunakan dalam perencanaan pajak. Prinsip ini biasanya akan mengubah penghasilan yang sebenarnya dapat dikenai pajak menjadi penghasilan yang tidak dipajaki dan mengubah beban yang sebenarnya tidak dapat dikurangkan atau *non-deductible* menjadi beban yang dapat dikurangkan atau *deductible*, ataupun sebaliknya sesuai ketentuan perpajakan. Perubahan tersebut dapat menimbulkan resiko adanya perubahan pajak terutang. Penerapan dari konsep ini menyiratkan bahwa pengeluaran baru dapat dikurangkan dari penghasilan kotor untuk pihak yang membayar jika pihak penerima

uang atas biaya perusahaan tersebut melaporkannya sebagai penghasilan serta penghasilan tersebut dikenai pajak.<sup>77</sup>

Perbedaan prinsip yang diterapkan dalam akuntansi keuangan dengan ketentuan perpajakan terbagi atas beda tetap atau permanen (*permanent differences*) dan beda waktu atau sementara (*temporary differences*).

#### 1. Beda Tetap/Permanen (*Permanent Differences*)

Beda tetap merupakan perbedaan yang bersifat permanen karena antara SAK dengan ketentuan perpajakan mengakui penghasilan maupun biaya secara berbeda, maksudnya koreksi fiskal yang telah dijalankan tidak dihitung bersama laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Penghasilan dan beban dalam beda tetap diakui sesuai dengan SAK bukan sesuai peraturan perpajakan ataupun sebaliknya. Beda tetap menyebabkan laba atau rugi berdasarkan akuntansi berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable income*).<sup>78</sup> Jadi, apabila pada periode berjalan penghasilan atau biaya tertentu tidak diakui menjadi penghasilan atau biaya menurut undang-undang maka periode mendatang tetap tidak diakui menjadi penghasilan atau biaya dalam laporan laba/rugi.<sup>79</sup>

Berikut merupakan hal-hal yang harus dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan:<sup>80</sup>

- a) Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b) Penghasilan yang bukan objek pajak yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

---

<sup>77</sup> Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm.235

<sup>78</sup> Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi ...*, hlm. 218.

<sup>79</sup> Edy Suprianto, *Akuntansi ...*, hlm. 133.

<sup>80</sup> Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi ...*, hlm. 218

- c) Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang bersifat pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- d) Biaya yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
- e) Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
- f) Sanksi perpajakan.

Jadi, apabila dalam *income statement* mengandung penghasilan atau biaya sebagaimana yang dimaksud, maka harus dilakukan perubahan atau penyesuaian.

## 2. Beda Waktu/Sementara (*Temporary Differences*)

Beda waktu merupakan perbedaan yang muncul karena perbedaan situasi dan cara untuk mengakui suatu penghasilan dan biaya antara standar dan pedoman akuntansi dengan peraturan perpajakan. Perbedaan tersebut menyebabkan munculnya perbedaan masa pengakuan penghasilan dan biaya antara suatu tahun pajak dengan tahun berikutnya.<sup>81</sup> Perbedaan ini bersifat sementara atau temporer, artinya secara keseluruhan penghasilan ataupun biaya berdasarkan akuntansi maupun perpajakan adalah sesuatu yang sangat mirip, namun alokasinya berbeda setiap tahun.<sup>82</sup> Hal ini menunjukkan bahwa koreksi fiskal yang dilakukan akan dihitung dengan keuntungan kena pajak tahun-tahun berikutnya. Jadi, apabila suatu penghasilan atau biaya tidak bisa diakui dalam *income*

---

<sup>81</sup> Erly Suandy, *Perencanaan ...*, hlm.108.

<sup>82</sup> Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi ...*, hlm. 218.

*statement* periode berjalan, masih ada kemungkinan bisa diakui pada periode mendatang.<sup>83</sup>

Perbedaan waktu ini umumnya disebabkan oleh perbedaan asumsi atau teknik yang diterapkan dalam akuntansi keuangan dengan akuntansi fiskal. Asumsi atau metode ini akan mempengaruhi penilaian akun dalam *financial statement*.

Selain itu, pengakuan penghasilan atau biaya dalam akuntansi keuangan menggunakan sistem *cash basis* atau *accrual basis* untuk lebih dari satu tahun. Sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*, maka penghasilan atau biaya tersebut harus dialokasikan sesuai dengan masa perolehannya. Sedangkan, berdasarkan undang-undang PPh, pengakuan penghasilan atau biaya harus dilakukan sekaligus ketika penghasilan maupun biaya tersebut diterima atau dikeluarkan.

Beda waktu umumnya terjadi akibat perbedaan cara yang digunakan dalam perpajakan dengan akuntansi dalam hal berikut:<sup>84</sup>

- a) AkruaI dan realisasi.
- b) Penyusutan dan amortisasi. Dalam hal ini, undang-undang PPh hanya membolehkan penggunaan saldo menurun dan metode garis lurus.
- c) Penilaian persediaan. Metode yang diizinkan sesuai undang-undang PPh untuk menilai persediaan hanya metode *average* dan FIFO.
- d) Kompensasi kerugian fiskal.

### **2.1.11 Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal**

Rekonsiliasi atau koreksi fiskal merupakan sebuah proses penyesuaian keuntungan akuntansi dengan ketentuan perpajakan dalam rangka memperoleh laba fiskal atau keuntungan yang sudah sesuai

---

<sup>83</sup> Edy Suprianto, *Akuntansi ...*, hlm. 140.

<sup>84</sup> Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati ..., hlm. 219.

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Agoes dan Trisnawati menjelaskan bahwa:

“koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.”<sup>85</sup>

Sedangkan, Edy Suprianto mengemukakan bahwa:

“rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses penyesuaian laporan laba/rugi fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan di Indonesia sehingga diperoleh laba/rugi fiskal sebagai dasar untuk perhitungan pajak penghasilan untuk satu tahun tertentu.”<sup>86</sup>

Jadi, rekonsiliasi atau koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian atas keuntungan akuntansi untuk menghasilkan laba fiskal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan pajak penghasilan suatu periode.

Sesuai dengan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonsiliasi fiskal memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu:

1. Laporan Laba/Rugi Akuntansi

Laporan laba/rugi akuntansi merupakan dasar dari penyusunan laporan rekonsiliasi fiskal. Hal tersebut disebabkan karena penghasilan oleh perusahaan dicatat dalam laporan laba/rugi. Nilai laba/rugi dalam laporan ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah pajak yang harus ditanggung dan dilunasi oleh perusahaan.

2. Koreksi atau Penyesuaian Fiskal

Penggunaan metode atau asumsi dalam menyusun laporan keuangan yang dilakukan sesuai SAK dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dengan penyusunan yang dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan tersebut dapat berupa beda waktu atau beda tetap. Oleh karena itu, penyesuaian

---

<sup>85</sup> Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi ...*, hlm. 218.

<sup>86</sup> Edy Suprianto, *Akuntansi ...*, hlm. 132.

fiskal ini dijalankan apabila terdapat ketidakcocokan atau kesalahan antara kedua aturan tersebut.

### 3. Laba/Rugi Fiskal

Laba/rugi fiskal adalah hasil akhir dari proses koreksi yang dilakukan atas perbedaan yang terjadi terhadap pendapatan atau beban dalam laporan laba/rugi akuntansi agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laba/rugi fiskal menjadi dasar dalam menghitung jumlah pajak terutang bagi entitas atau perusahaan.

Jadi, untuk memperoleh laba fiskal atau PKP sebagai dasar perhitungan pajak, perusahaan hanya perlu membuat satu pembukuan berdasarkan SAK dan kemudian dilakukan rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal tidak membutuhkan jurnal khusus secara akuntansi karena pada dasarnya koreksi ini tidak merubah angka saldo pada rekening riil atau nominal dalam neraca maupun laporan laba/rugi. Koreksi fiskal tersebut menghasilkan koreksi positif maupun koreksi negatif karena adanya beda waktu atau beda tetap.<sup>87</sup>

#### 1. Koreksi Positif

Koreksi positif merupakan koreksi fiskal yang mengakui semakin kecilnya beban dalam laporan laba/rugi akuntansi karena terdapat pengurangan biaya sehingga mengakibatkan adanya penambahan penghasilan.<sup>88</sup> Jadi, koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif umumnya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:<sup>89</sup>

- a) Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*).
- b) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- c) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.

<sup>87</sup> Djoko Muljono, *Akuntansi Pajak*, Yogyakarta: ANDI, 2006, hlm. 143-145.

<sup>88</sup> Djoko Muljono, *Akuntansi ...*, hlm. 146.

<sup>89</sup> Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi ...*, hlm. 219.

d) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

## 2. Koreksi Negatif

Koreksi negatif merupakan koreksi fiskal yang menyebabkan beban dalam laporan laba/rugi diakui lebih besar karena terjadi penambahan beban dalam laporan tersebut sehingga mengakibatkan adanya pengurangan penghasilan.<sup>90</sup> Jadi, koreksi negatif terjadi ketika keuntungan menurut akuntansi pajak berkurang. Koreksi negatif umumnya dipelukan apabila terdapat hal-hal berikut:<sup>91</sup>

- a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- b) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
- c) Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- d) Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- e) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- f) Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Jadi, koreksi positif merupakan suatu koreksi yang mana dengan koreksi ini laba fiskal bertambah. Sedangkan, koreksi negatif merupakan suatu penyesuaian atau koreksi yang berdampak pada menurunnya laba fiskal.

Menurut akuntansi keuangan apabila pendapatan entitas menurut akuntansi keuangan lebih tinggi daripada menurut akuntansi pajak, maka entitas harus melakukan penyesuaian atau koreksi negatif karena pendapatan akan berkurang sehingga akan berdampak pada berkurangnya laba. Sebaliknya, jika pendapatan yang ditunjukkan oleh akuntansi keuangan tidak sebanyak pendapatan yang ditunjukkan oleh akuntansi pajak, maka diperlukan adanya koreksi atau penyesuaian positif karena

---

<sup>90</sup> Djoko Muljono, *Akuntansi ...*, hlm. 146.

<sup>91</sup> Agoes, Sukrisno dan Estranita Trisnawati, *Akuntansi ...*, hlm. 219.

pendapatan akan meningkat dan laba juga akan meningkat.<sup>92</sup> Ketika biaya menurut akuntansi keuangan lebih tinggi dari biaya menurut akuntansi pajak maka entitas harus melakukan koreksi atau penyesuaian positif karena biaya akan berkurang sehingga akan meningkatkan laba. Sebaliknya, jika biaya menurut akuntansi keuangan lebih rendah dari biaya menurut akuntansi pajak maka diperlukan adanya koreksi atau penyesuaian negatif karena biaya akan meningkat sedangkan laba akan menurun.<sup>93</sup>

### 2.1.12 Jakarta Islamic Index (JII)

*Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan salah satu indeks saham syariah yang beranggotakan 30 saham syariah paling *liquid* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah memenuhi kriteria tertentu. Diantara kriteria tersebut ialah ditentukan dari urutan *average* kapitalisasi pasar yang paling signifikan dalam setahun terakhir dan nilai transaksi harian di pasar reguler tertinggi. *Jakarta Islamic Index* (JII) dirilis oleh BEI sejak tanggal 3 Juli 2000 dengan harapan dapat membantu dan memandu investor dalam berinvestasi secara syariah tanpa khawatir terdapat unsur ribawi. Oleh sebab itu, perusahaan yang menjadi anggota JII diharapkan telah sejalan dengan dasar syariah dan mampu bertahan serta bebas dari praktik perataan laba.

Proses *review* 30 saham syariah paling *liquid* yang dapat menjadi anggota JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Mei dan November.<sup>94</sup> Berikut terlampir data perusahaan yang masuk dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode tahun 2014-2019:

---

<sup>92</sup> Edy Suprianto, *Akuntansi ...*, hlm. 154.

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diakses pada Selasa, 11 Agustus 2020 pukul 0:07

**Tabel 2.2**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Desember 2013 s.d. Mei 2014**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
3.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
4.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
5.	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.	Tetap
6.	BMTR	Global Mediacom Tbk.	Tetap
7.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
8.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	Tetap
9.	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
10.	HRUM	Harum Energy Tbk.	Tetap
11.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
12.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
13.	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
14.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Tetap
15.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Tetap
16.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
17.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
18.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Tetap
19.	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.	Tetap
20.	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.	Tetap
21.	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk.	Baru
22.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
23.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
24.	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Baru
25.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
26.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
27.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
28.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
29.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
30.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 2.3**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Juni s.d. November 2014**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
3.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
4.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
5.	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.	Tetap
6.	BMTR	Global Mediacom Tbk.	Tetap
7.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
8.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	Tetap
9.	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Baru
10.	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
11.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
12.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Baru
13.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
14.	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	Tetap
15.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Tetap
16.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Tetap
17.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
18.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
19.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Tetap
20.	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.	Tetap
21.	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk.	Baru
22.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
23.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
24.	SILO	Siloam International Hospitals Tbk.	Baru
25.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
26.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
27.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
28.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
29.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
30.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 2.4**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Desember 2014 s.d. Mei 2015**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
3.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
4.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Baru
5.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
6.	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.	Tetap
7.	BMTR	Global Mediacom Tbk.	Tetap
8.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
9.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	Tetap
10.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
11.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Baru
12.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
13.	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	Tetap
14.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Tetap
15.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
16.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
17.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Tetap
18.	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.	Tetap
19.	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk.	Baru
20.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
21.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
22.	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Baru
23.	SILO	Siloam International Hospitals Tbk.	Tetap
24.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
25.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
26.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Baru
27.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
28.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
29.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
30.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 2.5**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Juni s.d. November 2015**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
3.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
4.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
5.	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.	Tetap
6.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
8.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
9.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Baru
10.	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
11.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Tetap
12.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Baru
13.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
14.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
15.	LPPF	Matahari Departement Store Tbk.	Baru
16.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Tetap
17.	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk.	Tetap
18.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
19.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
20.	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Baru
21.	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Baru
22.	SILO	Siloam International Hospitals Tbk.	Tetap
23.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
24.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
25.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Tetap
26.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
28.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
29.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
30.	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Baru

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 2.6**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Desember 2015 s.d. Mei 2016**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
3.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
4.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
5.	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.	Tetap
6.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
8.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
9.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
10.	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
11.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Tetap
12.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Tetap
13.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
14.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
15.	LPPF	Matahari Departement Store Tbk.	Tetap
16.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Tetap
17.	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	Baru
18.	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk.	Tetap
19.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
20.	PTPP	PP ( Persero) Tbk.	Tetap
21.	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Tetap
22.	SILO	Siloam International Hospitals Tbk.	Tetap
23.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
24.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
25.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Tetap
26.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
28.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
29.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
30.	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Tetap

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 2.7**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Juni s.d. November 2016**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
3.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
4.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
5.	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.	Tetap
6.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
8.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
9.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
10.	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
11.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Tetap
12.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
13.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
14.	LPPF	Matahari Departement Store Tbk.	Tetap
15.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Tetap
16.	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	Tetap
17.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
18.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Baru
19.	PTPP	PP ( Persero) Tbk.	Tetap
20.	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Tetap
21.	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Baru
22.	SILO	Siloam International Hospitals Tbk.	Tetap
23.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
24.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
25.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Tetap
26.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
28.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
29.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
30.	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Tetap

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 2.8**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Desember 2016 s.d. Mei 2017**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2.	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.	Baru
3.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
4.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
5.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Baru
6.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
7.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
8.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
9.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
10.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
11.	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
12.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
13.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
14.	LPPF	Matahari Departement Store Tbk.	Tetap
15.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Tetap
16.	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.	Tetap
17.	MYRX	Hanson International Tbk.	Baru
18.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
19.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
20.	PTPP	PP ( Persero) Tbk.	Tetap
21.	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Tetap
22.	SILO	Siloam International Hospitals Tbk.	Tetap
23.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
24.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
25.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Tetap
26.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
28.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
29.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
30.	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Tetap

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 2.9**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Juni s.d. November 2017**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	Tetap
2.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
3.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
4.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
5.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
6.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7.	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Baru
8.	EXCL	XL Axiata Tbk.	Baru
9.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
10.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
11.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
12.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
13.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
14.	LPPF	Matahari Departement Store Tbk.	Tetap
15.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Tetap
16.	MYRX	Hanson International Tbk.	Tetap
17.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
18.	PPRO	PP Properti Tbk.	Baru
19.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
20.	PTPP	PP ( Persero) Tbk.	Tetap
21.	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Tetap
22.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
23.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
24.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.	Tetap
25.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
26.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Baru
27.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
28.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
29.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
30.	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Tetap

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 2.10**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Desember 2017 s.d. Mei 2018**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
2.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
3.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
4.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
5.	BRPT	Barito Pacific Tbk.	Baru
6.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7.	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Tetap
8.	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
9.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
10.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
11.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
12.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
13.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
14.	LPPF	Matahari Departement Store Tbk.	Tetap
15.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	Tetap
16.	MYRX	Hanson International Tbk.	Tetap
17.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
18.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
19.	PTPP	PP ( Persero) Tbk.	Tetap
20.	PWON	Pakuwon Jati Tbk.	Tetap
21.	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Baru
22.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
23.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
24.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
25.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Tetap
26.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
27.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
28.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
29.	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk.	Baru
30.	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Tetap

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 2.11**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Juni s.d. November 2018**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
2.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
3.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
4.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
5.	BRPT	Barito Pacific Tbk.	Tetap
6.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7.	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Tetap
8.	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
9.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
10.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
11.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
12.	INDY	Indika Energy Tbk.	Baru
13.	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	Baru
14.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Baru
15.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
16.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	Tetap
17.	LPPF	Matahari Departement Store Tbk.	Tetap
18.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
19.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
20.	PTPP	PP ( Persero) Tbk.	Tetap
21.	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Tetap
22.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
23.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
24.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
25.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Tetap
26.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
27.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
28.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
29.	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk.	Tetap
30.	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk.	Tetap

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 2.12**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Desember 2018 s.d. Mei 2019**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
2.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
3.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
4.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
5.	BRPT	Barito Pacific Tbk.	Tetap
6.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	Baru
8.	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Tetap
9.	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
10.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
11.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
12.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
13.	INDY	Indika Energy Tbk.	Tetap
14.	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
15.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Tetap
16.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Baru
17.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
18.	LPPF	Matahari Departement Store Tbk.	Tetap
19.	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.	Tetap
20.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
21.	PTPP	PP (Persero) Tbk.	Tetap
22.	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Tetap
23.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
24.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.	Tetap
25.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
26.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Tetap
27.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
28.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
29.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
30.	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk.	Tetap

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 2.13**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Juni s.d. November 2019**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
2.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
3.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
4.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
5.	BRPT	Barito Pacific Tbk.	Tetap
6.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7.	BTPS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Baru
8.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	Tetap
9.	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Tetap
10.	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.	Baru
11.	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
12.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
13.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
14.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
15.	INDY	Indika Energy Tbk.	Tetap
16.	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	Tetap
17.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Tetap
18.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Baru
19.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Tetap
20.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
21.	LPPF	Matahari Departement Store Tbk.	Tetap
22.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
23.	PTPP	PP ( Persero) Tbk.	Tetap
24.	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Tetap
25.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
26.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
28.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
29.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap
30.	WSBP	Waskita Beton Precast Tbk.	Tetap

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Tabel 2.14**  
**Daftar Saham yang Masuk dalam Penghitungan Jakarta Islamic Index (JII)**  
**Periode Desember 2019 s.d. Mei 2020**

No.	Kode	Nama Saham	Keterangan
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk.	Tetap
2.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	Tetap
3.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk.	Tetap
4.	ASII	Astra International Tbk.	Tetap
5.	BRPT	Barito Pacific Tbk.	Tetap
6.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	Tetap
7.	BTPS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Tetap
8.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	Tetap
9.	CTRA	Ciputra Development Tbk.	Tetap
10.	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.	Tetap
11.	EXCL	XL Axiata Tbk.	Tetap
12.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.	Tetap
13.	INCO	Vale Indonesia Tbk.	Tetap
14.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	Tetap
15.	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	Tetap
16.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	Tetap
17.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	Tetap
18.	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	Tetap
19.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Tetap
20.	LPPF	Matahari Departement Store Tbk.	Tetap
21.	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.	Baru
22.	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	Baru
23.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.	Tetap
24.	PTPP	PP ( Persero) Tbk.	Tetap
25.	SCMA	Surya Citra Media Tbk.	Tetap
26.	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	Tetap
27.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	Baru
28.	UNTR	United Tractors Tbk.	Tetap
29.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	Tetap
30.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Tetap

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang relevan dengan apa yang akan penulis teliti yaitu:

**Tabel 2.15 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Achmad Hidayat (2018)	<i>Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini Dan Pajak Tangguhan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Agribisnis Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2012-2014</i>	-Beban Pajak Kini (X1) -Pajak Tangguhan (X2) -Laba Bersih (Y)	Beban pajak saat ini dan pajak tangguhan secara parsial dan sekaligus berpengaruh pada laba bersih, sehingga dua variabel independen dapat digunakan untuk menilai nilai laba bersih yang akan diperoleh perusahaan agribisnis.
2.	Felicia Amanda dan Meiriska Febrianti (2015)	<i>Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan Dan Basis AkruaI Terhadap Manajemen Laba</i>	-Beban Pajak Kini (X1) -Beban Pajak Tangguhan (X2) -Basis AkruaI (X3) -Manajemen Laba (Y)	Beban pajak kini berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, basis akruaI tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan beban pajak kini, beban pajak tangguhan, dan basis akruaI secara simultan

				berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
3.	Elyzabet I. Marpaung dan Lauw Tjun Tjun (2016)	<i>Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax to Book Ratio Terhadap Kinerja Perusahaan</i>	-Pengaruh Pajak Tangguhan (X1) -Tax to Book Ratio (X2) -Kinerja Perusahaan (Y)	Rasio pajak terhadap buku dan pajak tangguhan tidak mempengaruhi kinerja perusahaan baik secara parsial maupun simultan.
4.	Vincent Junery (2016)	<i>Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Bank dan Lembaga Keuangan yang Terdaftar di BEI 2010-2013)</i>	-Beban Pajak Tangguhan (X1) -Beban Pajak Kini (X2) -Kompensasi Manajemen (X3) -Manajemen Laba (Y)	Beban pajak tangguhan dan beban pajak kini berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan, kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
5.	Yosy Annisa (2018)	<i>Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, Perencanaan Pajak, Leverage Dan Kompensasi</i>	-Beban Pajak Tangguhan (X1) -Beban Pajak Kini (X2) -Perencanaan Pajak (X3) -Leverage (X4)	Beban pajak tangguhan, beban pajak kini, perencanaan pajak, leverage, dan kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen laba.

		<i>Manajemen Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)</i>	-Kompensasi Manajemen (X5) -Manajemen Laba (Y)	
6.	Vera Handayani dan Mayasari (2018)	<i>Analisis Pengaruh Hutang Terhadap Laba Bersih pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)</i>	-Hutang (X) -Laba Bersih (Y)	Hutang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
7.	Asti Asita (2017)	<i>Pengaruh Likuiditas, Hutang, Beban Pemasaran dan pertumbuhan Penjualan Terhadap Laba Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2016</i>	-Likuiditas (X1) -Hutang (X2) -Beban Pemasaran (X3) -Pertumbuhan Penjualan (X4) - Laba (Y)	Secara parsial menunjukkan bahwa variabel likuiditas, beban pemasaran dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Sementara hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba. Secara simultan variabel likuiditas, hutang, beban pemasaran dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap laba.

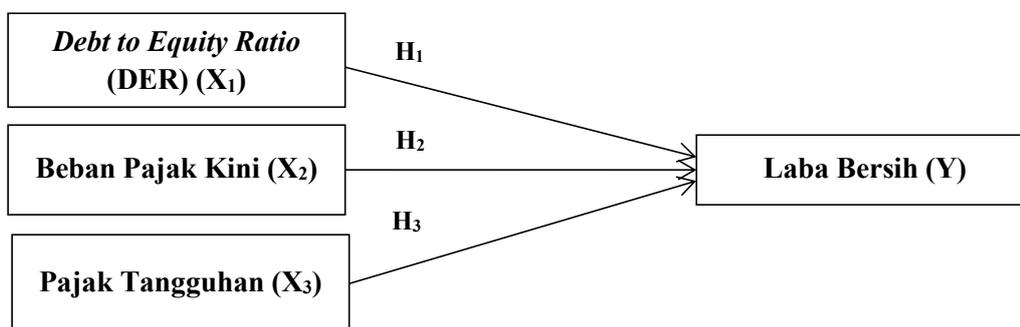
8.	Ervina Indriyani (2018)	<i>Pengaruh Hutang dan Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih (Survei pada perusahaan Property dan Real Estate, Kontruksi Bangunan sub sektor Kontruksi Bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017)</i>	-Hutang (X1) -Biaya Produksi (X2) -Laba Bersih (Y)	Hutang berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih dan biaya produksi berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih.
9.	Dea Nony Agustina dan Mulyadi	<i>Pengaruh Debt To Equity Ratio, Total Asset Turn Over, Current Ratio, Dan Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia</i>	- Debt To Equity Ratio (X1) - Total Asset Turn Over (X2) - Current Ratio (X3) - Net Profit Margin (X4) - Pertumbuhan Laba (Y)	Secara individu variabel <i>Debt to Equity Ratio</i> , dan <i>Current Ratio</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Laba Perusahaan Manufaktur di BEI, sedangkan variabel <i>Total Assets Turn Over</i> dan <i>Net Profit Margin</i> berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Laba Perusahaan Manufaktur di BEI.
10.	Claudia	<i>Pengaruh</i>	- Current	Secara parsial <i>Current</i>

	<p>Angelina (2019)</p>	<p><i>Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Perputaran Kas dan Total Asset TurnOver terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Food &amp; Beverages yang terdaftar di BEI.</i></p>	<p><i>Ratio (X1)</i> - <i>Debt to Equity Ratio (X2)</i> - Perputaran Kas (X3) - <i>Total Asset TurnOver (X4)</i> - <i>Profitabilitas (Y)</i></p>	<p><i>Ratio</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas. <i>Debt To Equity Ratio, Perputaran Kas dan Total Asset Turnover (TATO)</i> tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan secara simultan, semua variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh terhadap Profitabilitas pada perusahaan <i>Food &amp; Beverages</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</p>
--	----------------------------	--	--	---

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Mengacu pada uraian yang telah dijabarkan, hubungan antara variabel dalam penelitian ini dapat dirumuskan menggunakan kerangka pemikiran seperti Gambar 2.1 berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan: X<sub>1</sub>            ———> Y : Variabel X<sub>1</sub> terhadap Y  
 X<sub>2</sub>            ———> Y : Variabel X<sub>2</sub> terhadap Y  
 X<sub>3</sub>            ———> Y : Variabel X<sub>3</sub> terhadap Y

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* Terhadap Laba Bersih

*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang berguna dalam mengukur modal perusahaan yang didanai oleh hutang atau mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang menggunakan modal sendiri. Semakin tinggi nilai DER memperlihatkan bahwa pendanaan perusahaan lebih banyak memanfaatkan hutang dibandingkan dengan ekuitasnya. Sehingga suatu perusahaan diharapkan memiliki tingkat hutang yang rendah. Teori agensi dan *Debt to Equity Ratio* memiliki keterkaitan karena keduanya berhubungan dengan konflik kepentingan antara berbagai pihak dalam perusahaan dan bagaimana struktur modal dapat mempengaruhi hal

tersebut. Menurut Henry Simamora (2000), DER mengindikasikan tingkat kerugian yang dapat ditanggung oleh perusahaan tanpa membahayakan kepentingan kreditor. Kreditor menjadi prioritas utama atas aset perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham apabila suatu perusahaan mengalami liquidasi.<sup>95</sup> Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam memanfaatkan hutang karena apabila tingkat hutang lebih tinggi dari ekuitas yang dimiliki hal tersebut dapat mempengaruhi penurunan laba perusahaan.

Lisa Utari (2022) menyatakan bahwa “*Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih”. Sedangkan menurut Hadijah Febriana, et. Al (2022), *Debt to Equity Ratio* (DER) secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Asti Asita (2017) yang menyatakan bahwa hutang yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba perusahaan, maka hipotesis yang dapat dibuat yaitu:<sup>96</sup>

H<sub>1</sub>: *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan.

#### 2.4.2 Pengaruh Beban Pajak Kini Terhadap Laba Bersih

Beban pajak kini merupakan total pajak penghasilan pada satu masa atas PKP yang terutang atau jumlah pajak penghasilan pada periode saat ini. Besar beban pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang sebelumnya sudah dilakukan koreksi fiskal. Koreksi ini dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan pendapatan atau biaya antara standar akuntansi yang berlaku umum dengan yang berlaku dalam

---

<sup>95</sup> Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis Jilid II*, Jakarta : Salemba Empat, 2000, hlm. 533.

<sup>96</sup> Asti Asita, Skripsi: “Pengaruh Likuiditas, Hutang, Beban Pemasaran Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Laba Bersih Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2016”, Makassar: UIN Alauddin, 2017, hlm. 23.

peraturan perpajakan dan menimbulkan adanya beda waktu dengan beda tetap. Amanda dan Febrianti (2015) mengutip pendapat Mills dalam Ettredge et. al yang menyatakan bahwa beban pajak kini menunjukkan efek dari nilai perbedaan antara beda waktu dengan beda tetap yang mana perbedaan antara penghasilan kena pajak dengan laba akuntansi dapat merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam membuat laba menjadi lebih tinggi.<sup>97</sup>

Menurut teori agency, suatu perusahaan berpeluang besar melakukan manajemen laba apabila perusahaan mengharapkan laba yang tinggi. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, semakin tinggi laba yang diharapkan manajemen maka akan semakin tinggi pula perencanaan pajak perusahaan agar tidak membayar pajak yang tinggi, sehingga semakin besar beban pajak kini pada sebuah perusahaan maka semakin kecil laba yang akan diperoleh.<sup>98</sup> Achmad Hidayat (2018) menyampaikan bahwa beban pajak saat ini dan pajak tangguhan secara parsial dan sekaligus berpengaruh pada laba bersih. Dengan demikian hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H<sub>2</sub>: Beban pajak kini berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan.

#### **2.4.3 Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Laba Bersih**

Teori agensi menurut Mills dan Newberry (2001) menyatakan dalam meminimalkan tingkat kesalahan informasi diperlukan pengawasan langsung dari wakil prinsipal. Apabila tingkat kesalahan informasi tersebut cukup tinggi maka merupakan satu bukti lemahnya

---

<sup>97</sup> Felicia Amanda dan Meiriska Febrianti, "Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan Dan Basis AkruaI Terhadap Manajemen Laba", *Ultima Accounting*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, hlm. 77.

<sup>98</sup> Assyafiq Dian Nugraha, "Analisis Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, Discretionary Accrual, Debt to Equity Ratio dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman Tahun 2018-2020)", Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, hlm. 14.

pengawasan serta pengendalian dari wakil prinsipal. Semakin besar harapan manajemen untuk memperoleh laba yang tinggi akan menyebabkan semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba perpajakan.<sup>99</sup> Beban (manfaat) pajak tangguhan merupakan beban atau manfaat yang muncul karena terdapat perbedaan waktu antara keuntungan komersial dengan keuntungan fiskal. Selisih dari perbedaan pengakuan tersebut atas adanya beda waktu menghasilkan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan, sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan. Dalam penelitian yang dilakukan Amanda dan Febrianti (2015), mengungkapkan beberapa temuan penelitian yang menyatakan terdapat pengaruh antara beban pajak tangguhan dengan manajemen laba dengan cara menaikkan atau menurunkan beban yang diakui dalam laporan laba rugi sehingga pajak tangguhan diduga berpengaruh terhadap laba bersih.<sup>100</sup> Achmad Hidayat (2018) menyatakan beban pajak tangguhan secara parsial berpengaruh laba terhadap bersih, sehingga hipotesis yang dapat dibuat berikutnya adalah:

H<sub>3</sub>: Pajak tangguhan berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan

---

<sup>99</sup> Ghafara Mawaridi Mazini Tundjung, "Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI), *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4, No. 2, ISSN: 2337-3806, 2015, hlm. 4.

<sup>100</sup> Felicia Amanda dan Meiriska Febrianti, "Analisis ..., hlm. 77.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pengujiannya menggunakan metode pengujian statistik serta merupakan salah satu jenis penelitian dengan pendekatan yang sifatnya nyata dalam pengumpulan dan analisis datanya.<sup>101</sup> Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang merupakan bentuk dari variabel-variabel yang diteliti dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu.<sup>102</sup>

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari objek penelitian. Data ini umumnya berupa data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain serta dipublikasikan untuk kepentingan tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia atau telah tersusun dalam arsip. Sumber data dalam penelitian ini adalah [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *website* resmi perusahaan. Berikut adalah data sekunder yang digunakan:

1. *Annual report* perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2014-2019 yang diperoleh melalui *website* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
2. Data pendukung lainnya yang diperoleh dari *website* resmi perusahaan ataupun *website* [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com).

---

<sup>101</sup> Asep Hermawan dan Husna Leila Yusran, *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: KENCANA, 2017, hlm. 6.

<sup>102</sup> Jonathan Sarwono, *Mixed Methods: Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011, hlm. 20.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari individu atau unit dalam ruang lingkup penelitian atau semua bagian dari subjek atau objek yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian yang ada pada suatu wilayah.<sup>103</sup> Populasi yang digunakan adalah seluruh entitas yang listing dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) dengan jumlah 30 entitas.

Sampel merupakan bagian yang dianggap dapat mewakili populasi yang dipilih dengan teknik tertentu untuk diamati karakteristiknya maupun diukur dan kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut sehingga dapat dianggap mewakili populasi.<sup>104</sup> Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dari metode *non-probability sampling*, yaitu metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian.<sup>105</sup> Jadi, sampel yang digunakan merupakan perusahaan terpilih dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan terdaftar secara konsisten dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2014-2019.
2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember untuk periode 2014-2019 dan telah diaudit oleh auditor independen.
3. Laporan keuangan tahunan tersebut memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
4. Laporan keuangan tahunan tersebut dinyatakan dengan mata uang Rupiah.

---

<sup>103</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 75.

<sup>104</sup> Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: In Media, 2013, hlm. 87.

<sup>105</sup> Nanang Martono, *Metode...*, hlm. 75.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data, baik data primer maupun data sekunder yang akan digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan atau untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti.<sup>106</sup> Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi kepustakaan.

Dokumentasi merupakan kumpulan informasi dari seluruh kegiatan dan peristiwa suatu organisasi selama periode yang tidak terlalu lama.<sup>107</sup> Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data dokumen seperti profil, histori maupun *financial statement* perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Dalam penelitian ini metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengunduh *annual report* perusahaan terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) periode 2014-2019 melalui alamat *website* [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) maupun *website* resmi perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Sedangkan metode studi kepustakaan ialah melakukan telaah pustaka dengan membaca serta memahami berbagai literatur, hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian seperti skripsi, buku, jurnal maupun sumber lainnya.<sup>108</sup> Metode tersebut dilakukan untuk memadukan pengetahuan teoritis serta metode yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran

Variabel adalah konsep yang memiliki banyak nilai atau mempunyai nilai yang bermacam-macam, yaitu suatu sifat, karakteristik ataupun fenomena-fenomena yang mampu menunjukkan sesuatu agar dapat diukur maupun diamati yang nilainya bervariasi.<sup>109</sup> Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas (*independent variable*) dan satu variabel terikat (*dependent variable*). Definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

---

<sup>106</sup> Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 16.

<sup>107</sup> Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi ...*, hlm. 163.

<sup>108</sup> Nanang Martono, *Metode ...*, hlm. 46.

<sup>109</sup> Sofar Silaen dan Widiyono, *Metodologi ...*, hlm. 69.

### 3.5.1 Variabel Independen (X)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat menjelaskan terjadinya konsentrasi atau topik penelitian. Variabel tersebut merupakan variabel yang menghasilkan akibat pada variabel lain sehingga variabel bebas memengaruhi variabel lain.<sup>110</sup> Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio*, beban pajak kini dan beban pajak tangguhan.

#### 3.5.1.1 *Debt to Equity Ratio* (X1)

Hutang (*liabilities*) adalah sumber dana perusahaan yang bersumber dari entitas lain sehingga menjadi kewajiban perusahaan yang harus dipenuhi sebagai akibat dari transaksi masa lampau dan diselesaikan dengan adanya arus kas keluar dari keuangan perusahaan pada periode ini ataupun periode mendatang. Kemampuan perusahaan dalam menggunakan hutang untuk mendanai kegiatannya dapat diukur dengan rasio hutang atau *Debt to Equity Ratio*. Suatu perusahaan diharapkan memiliki tingkat hutang atau DER yang rendah karena penggunaan hutang yang terlalu tinggi memiliki risiko yang besar. *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat menunjukkan kondisi keuangan perusahaan tergolong sehat atau berisiko. Mengacu pada penelitian yang dilakukan Asti Asita,<sup>111</sup> *Debt to Equity Ratio* (DER) dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

*Debt to equity ratio* (DER) merupakan rasio yang berguna dalam mengukur modal perusahaan yang didanai

<sup>110</sup> Nanang Martono, *Metode ...*, hlm. 57.

<sup>111</sup> Asti Asita, Skripsi: "Pengaruh Likuiditas, Hutang, Beban Pemasaran Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Laba Bersih Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2016", Makassar: UIN Alauddin, 2017, hlm. 23.

hutang. Semakin tinggi nilai DER memperlihatkan bahwa pendanaan perusahaan lebih banyak memanfaatkan hutang dibandingkan dengan ekuitasnya. Menurut Henry Simamora (2000), DER mengindikasikan tingkat kerugian yang dapat ditanggung oleh perusahaan tanpa membahayakan kepentingan kreditor. Kreditor menjadi prioritas utama atas aset perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham apabila suatu perusahaan mengalami liquidasi.<sup>112</sup> Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam memanfaatkan hutang karena apabila tingkat hutang lebih tinggi dari ekuitas yang dimiliki hal tersebut dapat mempengaruhi laba perusahaan.

### 3.5.1.2 Beban Pajak Kini (X2)

Beban pajak kini merupakan total pajak penghasilan pada satu masa atas PKP yang terutang atau jumlah pajak penghasilan periode saat ini. Besar beban pajak kini dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang sebelumnya sudah dilakukan koreksi fiskal. Mengacu pada penelitian Amanda dan Febrianti pada tahun 2015, beban pajak kini yang dimaksud ditentukan dengan skala perbandingan yaitu dengan membagi beban pajak kini pada periode laporan keuangan tertentu dengan total *asset* periode sebelumnya.<sup>113</sup> Pengukuran variabel dapat dirumuskan sebagai berikut:

---

<sup>112</sup> Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis Jilid II*, Jakarta : Salemba Empat, 2000, hlm. 533.

<sup>113</sup> Felicia Amanda dan Meiriska Febrianti, "Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan Dan Basis Akrua Terhadap Manajemen Laba", *Ultima Accounting*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, hlm. 77.

$$\text{Beban Pajak Kini} = \frac{\text{Beban Pajak Kini periode } t}{\text{Total Aset periode } t - 1}$$

### 3.5.1.3 Pajak Tangguhan (X3)

Beban (manfaat) pajak tangguhan merupakan beban atau manfaat yang muncul karena terdapat perbedaan antara keuntungan komersial dengan keuntungan fiskal. Laba komersial adalah laba yang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya karena diperoleh berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan, laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Mengacu pada penelitian yang dilakukan Amanda dan Febrianti pada tahun 2015, pajak tangguhan diukur menggunakan skala rasio. Penghitungan dilakukan dengan menggunakan indikator membobot beban pajak tangguhan dengan total aset.<sup>114</sup>

$$\text{Pajak Tangguhan} = \frac{\text{Pajak Tangguhan periode } t}{\text{Total Aset periode } t - 1}$$

### 3.5.2 Variabel Dependen

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang berperan sebagai variabel yang dijabarkan dalam topik penelitian. Variabel ini adalah variabel yang terkena dampak dari variabel lain.<sup>115</sup> Variabel terikat yang digunakan adalah laba bersih (*profit margin*) (Y). Laba bersih merupakan hasil yang disajikan dalam laporan laba rugi yang diperoleh dari kelebihan seluruh pendapatan atas biaya untuk suatu periode setelah dikurangi pajak penghasilan. Laba bersih dapat diukur dengan:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Beban}$$

<sup>114</sup> Felicia Amanda dan Meiriska Febrianti, "Analisis ..., hlm. 77.

<sup>115</sup> Nanang Martono, *Metode ...*, hlm. 57.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian dengan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan metode yang diperuntukkan guna menunjukkan arah hubungan variabel dependen dengan variabel independen serta mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih.<sup>116</sup> Pengolahan data dikerjakan menggunakan microsoft Excel dan aplikasi *IBM SPSS Statistic 23*. Pengujian yang digunakan terdiri dari pengujian berikut:

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis dengan statistik deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau keadaan maupun karakteristik utama dari variabel penelitian. Data dalam analisis statistik deskriptif disajikan dalam bentuk skor minimum, skor maksimum, jangkauan (*range*), *mean*, standar deviasi dan variannya.<sup>117</sup> Dengan analisis ini, dapat diketahui bagaimana kondisi variabel penelitian, apakah dalam kondisi baik atau tinggi, cukup atau sedang, maupun buruk atau rendah.

#### 3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang harus dipenuhi oleh model regresi linier. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan model regresi dengan perkiraan yang tidak bias, yaitu nilai residul atau data harus terdistribusi secara normal.<sup>118</sup> Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa jenis pengujian, yaitu:

---

<sup>116</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 94.

<sup>117</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 76.

<sup>118</sup> Romie Priyastama, *Buku Sakti Kuasai SPSS*, Yogyakarta: Star Up, 2017, hlm. 116.

### 3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan pengujian yang berfungsi untuk menguji kenormalan distribusi data yang diteliti. Hal ini dilakukan karena model regresi yang baik adalah model regresi yang datanya terdistribusi secara normal. Metode yang dapat digunakan dalam uji normalitas adalah metode grafik atau dengan uji *One Sampe Kolmogorof-Smirnov*.<sup>119</sup>

Metode grafik dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data yang dihasilkan pada sumber diagonal dalam grafik *normal Probability Plot ( P-P plot) of Regression*. Apabila data yang diperoleh menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal dan searah sesuai garis diagonal, berarti residual data sudah memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal. Sedangkan, dengan uji *One Sampe Kolmogorof-Smirnov*, data yang terdistribusi normal secara *multivariate* adalah data yang memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.<sup>120</sup>

### 3.6.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan pengujian yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen. Model regresi dalam penelitian semestinya tidak memiliki korelasi di antara masing-masing variabel independen. Variabel independen yang tidak saling berkorelasi memiliki nilai yang sama dengan nol antar sesama variabel independent. Multikolinearitas dalam hal model regresi mampu dideteksi melalui hal sebagai berikut<sup>121</sup>:

---

<sup>119</sup> Romie Priyastama, *Buku ...*, hlm. 117.

<sup>120</sup> Hengky Latan dan Selva Temalagi, *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 57.

<sup>121</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi ...*, hlm. 103.

1. Suatu perkiraan model regresi empiris menghasilkan nilai  $R^2$  atau koefisien determinasi yang sangat tinggi, namun secara individu variabel terikat tidak banyak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel-variabel bebas.
2. Melalui hasil analisis matrik korelasi (*correlation matrix*) variabel-variabel independen. Indikasi adanya multikolinearitas terjadi apabila terdapat hubungan antar variabel yang cukup tinggi atau umumnya berada di atas 0,90. Multikolinearitas dapat terjadi karena adanya efek kombinasi antar variabel independen. Hal ini berarti bahwa tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen bukan berarti bebas dari multikolonieritas.
3. Dengan memperhatikan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* setiap variabel independen atau bebas akan menjadi variabel dependen, kemudian diregres terhadap variabel-variabel bebas lainnya. Jadi, hubungan setiap variabel bebas mana yang diterangkan oleh variabel bebas lainnya akan ditunjukkan melalui kedua ukuran ini.

*Tolerance* digunakan untuk mengukur dan menilai *variabilitas* variabel independen terpilih yang tidak diterangkan oleh variabel independen lainnya. Multikolinearitas terjadi apabila nilai *tolerance* kurang dari sama dengan 0.10 atau nilai VIF lebih dari sama dengan 10. Sebaliknya, apabila nilai *tolerance* lebih dari sama dengan 0.10 atau nilai VIF kurang dari sama dengan 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini karena, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{\text{tolerance}}$$

### 3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan atau korelasi yang terjadi antara *error* atau kesalahan pengganggu. Model regresi yang dapat digunakan adalah model regresi yang terbebas dari autokorelasi. Oleh karena itu, uji autokorelasi berfungsi untuk menguji adanya korelasi atau hubungan antara *error term* pada periode  $t$  dengan *error term* pada periode sebelumnya atau  $t-1$  dalam model regresi linear. Autokorelasi timbul akibat dari observasi atau pengamatan yang berurutan setiap waktu yang berkaitan satu sama lain. Hal tersebut disebabkan karena *residual* atau kesalahan pengganggu tidak bebas selama pengamatan berlangsung.<sup>122</sup>

Teknik yang bisa dilakukan guna mendeteksi autokorelasi yaitu uji *Durbin-Watson (DW test)*. Uji *Durbin-Watson (DW test)* dilakukan untuk mendeteksi autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*), dimana pengujian ini mensyaratkan tidak terdapat variabel lag pada variabel bebas serta harus terdapat *intercept* (konstanta) dalam model regresi.<sup>123</sup> Adanya masalah autokorelasi dapat ditentukan dengan membandingkan nilai DW yang dihasilkan dengan nilai DW yang dapat ditoleransi atau  $DW_{tabel}$ . Autokorelasi terjadi apabila nilai  $DW_{statistik}$  kurang dari  $DW_{tabel}$ . Sebaliknya, model regresi terbebas dari masalah autokorelasi apabila nilai  $DW_{statistik} > DW_{tabel}$ .

### 3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan perbedaan *variance* dari *residual* satu observasi dengan observasi lainnya. Model regresi yang harus digunakan adalah model yang homoskedastisitas atau

---

<sup>122</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi ...*, hlm. 107.

<sup>123</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi ...*, hlm. 108.

memiliki *variance* tetap dari *residual* satu observasi dengan observasi lainnya sehingga model terbebas dari heteroskedastisitas. Jadi, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji kesamaan *variance* dari *residual* dalam model regresi pada setiap pengamatan sehingga tidak terjadi ketidaksamaan atau heteroskedastisitas.<sup>124</sup> Pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji *Glejser*.

Uji *Glejser* dilakukan dengan mentransformasi nilai residual menjadi absolut residual kemudian nilai tersebut diregres dengan variabel bebas dalam model, apabila nilai signifikansi untuk variabel bebas yang diperoleh lebih besar dari 0,05 dapat dikatakan bahwa dalam model tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Oleh karena itu, pengujian ini dianggap sebagai metode paling akurat untuk melihat gejala pada variabel bebas sebab dilakukan dengan melihat nilai absolut residualnya.<sup>125</sup>

### 3.6.3 Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang bertujuan untuk menguji dan mengukur kekuatan hubungan atau pengaruh dari variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat serta untuk menerangkan arah hubungan tersebut.<sup>126</sup> Persamaan regresi linear berganda yang digunakan, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Laba Bersih

$\alpha$  = Konstanta atau *intercept*

$\beta_{1,2,3}$  = Koefisien variabel independen

<sup>124</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi ...*, hlm. 134

<sup>125</sup> Hengky Latan dan Selva Temalagi, *Analisis ...*, hlm. 66.

<sup>126</sup> Hengky Latan dan Selva Temalagi, *Analisis ...*, hlm. 84.

X1	= <i>Debt to Equity Ratio</i>
X2	= Beban pajak kini perusahaan
X3	= Beban pajak tangguhan perusahaan
$\varepsilon$	= error

### 3.6.4 Uji Hipotesis

#### 3.6.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien detrmisasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Nilai  $R^2$  ditujukan untuk menghindari bias terhadap jumlah variabel bebas yang masuk dalam model. Nilai  $R^2$  sendiri adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu artinya kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat semakin baik atau variabel–variabel bebas memberikan hampir semua infomasi yang diperlukan untuk meramalkan variasi variabel-variabel terikat. Sedangkan nilai  $R^2$  yang kecil menjelaskan bahwa kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas.<sup>127</sup>

#### 3.6.4.2 Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seluruh variabel bebas secara bersamaan apakah berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Uji statistik F sebenarnya mengungkapkan bahwa model atau hipotesis penelitian diterima atau ditolak. Hal ini ditentukan dengan melihat nilai probabilitas atau dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan nilai  $F_{tabel}$ . Variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau hipotesis ditolak apabila probabilitas yang dihasilkan kurang dari 0,05 ( $p < \alpha = 0,05$ ) atau

---

<sup>127</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi ...*, hlm. 95.

nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  (nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ ).<sup>128</sup> Begitu juga sebaliknya, hipotesis diterima atau variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat apabila nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 ( $p > \alpha = 0,05$ ) atau nilai  $F_{hitung}$  kurang dari nilai  $F_{tabel}$  (nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$ ).

#### 3.6.4.3 Uji Regresi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara individu dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan mengamati nilai probabilitas yang dihasilkan atau dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ .  $H_0$  ditolak atau variabel bebas (*independent variable*) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (*dependent variable*) secara individu jika nilai probabilitas signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05 atau nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$ . Begitu pun sebaliknya, apabila nilai probabilitas signifikansi lebih dari 0,05 atau nilai  $t_{hitung}$  kurang dari nilai  $t_{tabel}$ , maka variabel bebas secara individu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau  $H_0$  diterima.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi ...*, hlm. 96.

<sup>129</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi ...*, hlm. 97.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2014-2019. JII merupakan indeks saham syariah yang beranggotakan tiga puluh saham syariah paling *liquid* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah memenuhi kriteria tertentu. Diantara kriteria tersebut ialah ditentukan dari urutan *average* kapitalisasi pasar yang paling signifikan dalam setahun terakhir dan nilai transaksi harian di pasar reguler. *Jakarta Islamic Index* (JII) dirilis oleh BEI sejak tanggal 3 Juli 2000 dengan harapan mampu membantu dan memandu investor dalam berinvestasi secara syariah tanpa khawatir terdapat unsur ribawi. Oleh sebab itu, perusahaan yang menjadi anggota JII diharapkan telah sejalan dengan standar syariah dan mampu bertahan serta bebas dari praktik perataan laba.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang tercatat secara konsisten dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) selama tahun 2014-2019.
2. Perusahaan yang dimaksud telah menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember untuk periode 2014-2019 dan telah diaudit oleh auditor independen.
3. Laporan keuangan tahunan tersebut memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
4. Laporan keuangan tahunan tersebut dinyatakan dengan mata uang Rupiah.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Sampel Penelitian**

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1.	AKRA	AKR Corporindo Tbk
2.	ASII	Astra International Tbk
3.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
4.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
5.	KLBF	Kalbe Farma Tbk
6.	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk
7.	UNTR	United Tractors Tbk
8.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
9.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk

*Sumber: Data Sekunder diolah, 2021*

Berdasarkan teknik *purposive sampling* yang dilakukan maka diperoleh 9 perusahaan yang menjadi sampel penelitian seperti tercantum dalam tabel di atas. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 54 data perusahaan.

## 4.2 Analisis Data dan Interpretasi Data atau Pembahasan

### 4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi maupun karakteristik utama dari masing-masing variabel penelitian yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER), beban pajak kini, pajak tangguhan, dan laba bersih. Hasil statistik deskriptif untuk variabel dalam penelitian, disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DER_X1	54	18,65	296,48	109,0548	72,97477
BEBAN_PAJAK_KINI_X2	54	,00245	,15691	,0468088	,03756811
PAJAK_TANGGUHAN_X3	54	,00003	,02046	,0032845	,00389606
LABA_BERSIH_Y	54	703	32701	8536,41	9216,675
Valid N (listwise)	54				

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa selama periode penelitian terdapat 54 data yang diteliti. Statistik deskriptif yang ditunjukkan oleh variabel DER (*Debt to Equity Ratio*) sesuai tabel di atas memiliki nilai *minimum* sebesar 18,65 yang dimiliki oleh perusahaan Kalbe Farma Tbk pada tahun 2018 dan nilai *maximum* sebesar 296,48 dimiliki oleh perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2017. Sedangkan, nilai rata-rata variabel hutang sebesar 109,0548 dengan standar deviasi 72,97477.

Variabel beban pajak kini memiliki nilai *minimum* sebesar 0,00245 yang terdapat dalam perusahaan Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tahun 2019 dan nilai *maximum* sebesar 0,15691 yang terdapat dalam perusahaan Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2018. Rata-rata variabel beban pajak kini menunjukkan nilai sebesar ,0468088 dengan standar deviasi sebesar 0,03756811.

Nilai *minimum* yang ditunjukkan untuk variabel pajak tangguhan sesuai tabel di atas adalah sebesar 0,00003 yang terdapat dalam perusahaan Telkom Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018 dan nilai *maximum* yang ditunjukkan adalah sebesar 0,02046 terdapat dalam perusahaan United Tractors Tbk pada tahun 2015. Rata-rata dari variabel pajak tangguhan adalah sebesar 0,0032845 dengan standar deviasi sebesar 0,00389606.

Sedangkan, untuk variabel terikat yaitu laba bersih memiliki nilai *minimum* sebesar 703 yang ada pada perusahaan AKR Corporindo

Tbk dan Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tahun 2019 dan 2015. Nilai *maximum* laba bersih sebesar 32701 adapada perusahaan Telkom Indonesia (Persero) Tbk. *Mean* yang ditunjukkan untuk variabel laba bersih sebesar 8536,41 dengan nilai standar deviasi 9216,675.

#### 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

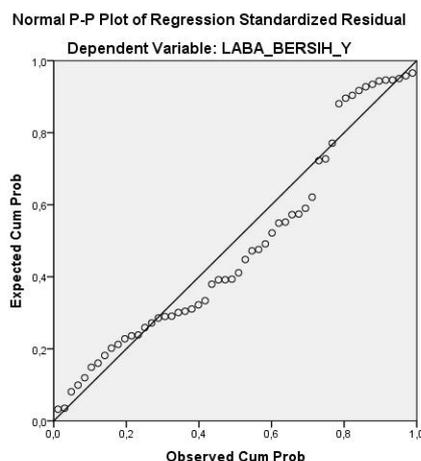
Uji asumsi klasik dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan model regresi dengan perkiraan yang tidak bias atau memperoleh model yang paling tepat untuk digunakan. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis pengujian, yaitu:

##### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi sebagai penguji kenormalan distribusi data yang diteliti. Metode yang digunakan untuk menguji model regresi dalam uji normalitas adalah metode grafik atau *normal Probability Plot (P-P Plot) of Regression* dan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Berikut terlampir grafik hasil uji *normal-robability Plot (P-P Plot) of Regression*:

**Tabel 4.3**

#### **Grafik *Normal Probability Plot (P-P Plot) of Regression***



Dengan melihat grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah berdistribusi normal karena sebaran data yang dihasilkan menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal dan searah sesuai garis diagonal.

Selain menggunakan *uji normal probability plot*, uji normalitas juga dilakukan dengan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Jika nilai Asymp. Sig. data lebih dari 0,05 maka sebaran data berdistribusi normal begitu pula sebaliknya. Berikut merupakan hasil dari uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*:

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,43409218
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,111
	Negative	-,109
Test Statistic		,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		,095 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat diketahui bahwa data residual telah berdistribusi secara normal, karena nilai Asymp. Sig. yang dihasilkan sebesar 0,095 lebih dari 0,05.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan dengan maksud untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau kolerasi antar variabel bebas dalam model regresi. Pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai

*tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DER_X1	,948	1,055
	BEBAN_PAJAK_KINI_X2	,871	1,148
	PAJAK_TANGGUHAN_X3	,904	1,107

a. Dependent Variable: LABA\_BERSIH\_Y

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* setiap variabel bebas yaitu *Debt to Equity Ratio*, beban pajak kini, dan pajak tangguhan berturut-urur lebih dari 0,10, yaitu sebesar 0,948, 0,871, dan 0,904. Sedangkan, nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* yang dihasilkan oleh variabel *Debt to Equity Ratio* adalah 1,055, beban pajak kini sebesar 1,148, dan pajak tangguhan sebesar 1,107. Nilai VIF tersebut kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi yang digunakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

#### 4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berfungsi untuk menguji adanya kolerasi atau hubungan antara kesalahan pengganggu pada suatu periode dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya dalam model regresi linear. Uji autokorelasi yang digunakan adalah uji *Durbin-Watson (DW test)* dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,617 <sup>a</sup>	,381	,335	,31151	2,039

a. Predictors: (Constant), PAJAK\_TANGGUHAN\_X3, DER\_X1, BEBAN\_PAJAK\_KINI\_X2

b. Dependent Variable: LABA\_BERSIH\_Y

Berdasarkan hasil output SPSS tersebut, dapat diketahui bahwa model regresi yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Hal tersebut dikarenakan nilai DW yang dihasilkan lebih dari nilai  $DW_{tabel}$  yaitu sebesar 2,039. Dimana nilai  $DW_{tabel}$  untuk jumlah sampel ( $n$ ) = 54 dengan jumlah variabel independen ( $k$ ) = 3 diperoleh nilai  $dL = 1,4464$  dan  $dU = 1,6800$ . Letak nilai  $DW_{statistik}$  sebesar 2,039 berada diantara nilai  $dU$  yaitu 1,68 dan  $4 - dU$  yaitu 2,32.

#### 4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji kesamaan *variance* dari *residual* dalam model regresi pada setiap pengamatan sehingga dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan atau heteroskedastisitas. Pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah uji *Glejser* dengan hasil pengujian, sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Uji Heteroskedastisitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,364	,296		1,227	,225
DER_X1	-,014	,121	-,017	-,116	,908
BEBAN_PAJAK_KINI_X2	-,003	,092	-,005	-,031	,976
PAJAK_TANGGUHAN_X3	-,004	,065	-,009	-,062	,951

a. Dependent Variable: ABRESID

Tabel hasil uji *glejser* di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel *Debt to Equity Ratio* sebesar 0,908, beban pajak kini sebesar 0,976, dan pajak tangguhan sebesar 0,951. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam data penelitian tidak terjadi adanya heteroskedastisitas karena nilai signifikansi dari setiap variabel bebas telah lebih dari 0,05.

#### 4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji dan mengukur pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat serta untuk menunjukkan arah hubungan tersebut.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,163	,515		8,085	,000
DER_X1	,085	,210	,053	,406	,687
BEBAN_PAJAK_KINI_X2	,527	,161	,450	3,283	,002
PAJAK_TANGGUHAN_X3	-,049	,113	-,059	-,436	,665

a. Dependent Variable: LABA\_BERSIH\_Y

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, persamaan regresi linear berganda yang dapat dibentuk sebagai berikut:

$$Y = 4,163 + 0,085 X_1 + 0,527 X_2 - 0,049 X_3 + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 4,163, artinya apabila pengungkapan *Debt to Equity Ratio*, beban pajak kini, dan pajak tangguhan nilainya 0, maka nilai variabel dependennya akan bernilai 4,163.
2. Nilai koefisien pada variabel *Debt to Equity Ratio* memiliki nilai positif sebesar 0,085 berarti bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap laba bersih perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap bertambahnya *Debt to Equity Ratio* maka akan meningkatkan pula laba bersih perusahaan.
3. Nilai koefisien pada variabel beban pajak kini bernilai positif sebesar 0,527 berarti bahwa beban pajak kini berpengaruh positif terhadap laba bersih perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan beban pajak kini perusahaan maka akan meningkatkan pula laba bersih perusahaan.
4. Nilai koefisien pada variabel pajak tangguhan bernilai negatif sebesar -0,049 maksudnya pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap laba bersih perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak tangguhan perusahaan maka akan menurunkan laba bersih perusahaan sebesar 0,049.

#### 4.2.4 Uji Hipotesis

##### 4.2.4.1 Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien detrmnasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,617 <sup>a</sup>	,381	,335	,31151

a. Predictors: (Constant), PAJAK\_TANGGUHAN\_X3, DER\_X1, BEBAN\_PAJAK\_KINI\_X2

b. Dependent Variable: LABA\_BERSIH\_Y

Sesuai dengan tabel 4.9 di atas, nilai *adjusted R square* yang dihasilkan sebesar 0,335. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel *Debt to Equity Ratio*, beban pajak kini, dan pajak tangguhan secara bersama-sama atau simultan mampu mempengaruhi laba bersih perusahaan sebesar 33,5%. Sedangkan sebesar 66,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel penelitian yang tidak diteliti.

#### 4.2.4.2 Uji Signifikansi (Simultan) atau Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan dengan maksud untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat. Uji statistik F sebenarnya menunjukkan bahwa model atau hipotesis penelitian diterima atau ditolak.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,243	3	,748	3,743	,017 <sup>b</sup>
	Residual	9,987	50	,200		
	Total	12,230	53			

a. Dependent Variable: LABA\_BERSIH\_Y

b. Predictors: (Constant), PAJAK\_TANGGUHAN\_X3, DER\_X1, BEBAN\_PAJAK\_KINI\_X2

Berdasarkan tabel hasil uji simultan atau uji F di atas, nilai  $F_{hitung}$  yang diperoleh sebesar 3,743. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  yakni sebesar 2,79. Sedangkan, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,017, nilai ini kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel bebas (*independent variable*) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (*dependent variable*) atau hipotesis diterima karena nilai  $F_{hitung} >$  dari nilai  $F_{tabel}$  dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05.

#### 4.2.4.3 Uji Regresi Parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan guna mengetahui bagaimana pengaruh dari setiap variabel bebas atau secara individu (parsial) dalam menjelaskan variabel terikat (*dependent variable*). Berikut adalah hasil uji statistik t:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Statistik T**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	4,163	,515		8,085	,000
	DER_X1	,085	,210	,053	,406	,687
	BEBAN_PAJAK_KINI_X2	,527	,161	,450	3,283	,002
	PAJAK_TANGGUHAN_X3	-,049	,113	-,059	-,436	,665

a. Dependent Variable: LABA\_BERSIH\_Y

Sesuai tabel 4.11 diketahui bahwa pengungkapan *Debt to Equity Ratio* memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,406 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 2,008 dengan nilai probabilitas signifikansi 0,687 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa  $H_1$  ditolak yang artinya variabel *Debt to Equity Ratio* secara parsial **tidak memiliki pengaruh signifikan** terhadap laba bersih perusahaan.

Variabel beban pajak kini memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,283 lebih besar dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 2,008 dengan nilai probabilitas signifikansi 0,002 kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_2$  diterima dan artinya variabel beban pajak kini secara parsial **berpengaruh signifikan** terhadap laba bersih perusahaan.

Sedangkan variabel pajak tangguhan memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,436 lebih kecil dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 2,008 dengan nilai probabilitas signifikansi 0,665 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut mengartikan bahwa variabel pajak tangguhan secara parsial **tidak berpengaruh signifikan** terhadap laba bersih perusahaan atau  $H_3$  ditolak.

### 4.3 Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (X1) terhadap Laba Bersih (Y)

Pemanfaatan hutang oleh perusahaan umumnya dilakukan dengan harapan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang akibat tingginya beban bunga dari aktivitas hutang yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Debt to Equity Ratio* (DER) **tidak memiliki pengaruh signifikan** terhadap laba bersih perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,406 < 2,008$ ) dengan nilai probabilitas signifikansi  $0,687 > 0,05$ . Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_1$  ditolak maknanya besar kecilnya *Debt to Equity Ratio* yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2014-2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini telah sejalan dengan penelitian Vera Handayani dan Mayasari (2018) yang

mengungkapkan bahwa hutang yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Asti Asita (2017) yang menyatakan bahwa hutang yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba perusahaan. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Ervina Indiyani (2018) yang menyatakan bahwa hutang yang dihitung dengan *Debt to Equity Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

*Debt to Equity Ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih karena perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* memiliki tingkat hutang yang rendah atau masih berada dalam batas normal, sehingga perusahaan masih dapat memenuhi hutangnya menggunakan modal sendiri. Hal ini dibuktikan dengan data penelitian, dimana dari seluruh sampel data hanya terdapat 2 perusahaan yang tingkat hutang (DER) lebih dari 2 yaitu PT. Unilever Indonesia Tbk dan PT. Wijaya Karya Tbk.

KODE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AKRA	147.9048	108.6604	96.06143	86.31229	100.8764	112.6651
ASII	96.38314	93.96916	87.16495	89.02271	97.69733	88.45167
ICBP	71.61958	62.0858	56.21858	55.57469	51.3498	45.13517
INDF	113.7285	112.9586	86.53209	87.67594	93.39704	77.48054
KLBF	27.39656	25.21485	22.15982	19.59119	18.64662	21.30372
TLKM	64.92464	77.8621	70.17642	77.0124	75.78067	88.66354
UNTR	56.5196	57.23567	50.13608	73.04472	103.8194	82.80641
UNVR	200.8426	225.8753	255.9736	296.4849	175.2844	290.9504
WIKA	226.2046	260.4634	146.1532	212.2198	244.0604	223.2254

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Hasil ini konsisten dengan teori *trade-off* menurut Brealy dan Myers yang dikutip oleh Asti Asita (2017) bahwa perusahaan dengan risiko bisnis besar harus memanfaatkan hutang yang lebih kecil dari pada perusahaan yang memiliki risiko bisnis rendah, karena semakin besar risiko bisnis akan semakin mempersulit keuangan perusahaan jika

pemanfaatan hutangnya semakin besar. Dengan demikian, diharapkan perusahaan mampu meningkat labanya karena perusahaan mampu mengelola pemanfaatan hutang dengan baik.

#### 4.3.2 Pengaruh Beban Pajak Kini Terhadap Laba Bersih

Hipotesis kedua adalah beban pajak kini berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel beban pajak kini secara parsial **berpengaruh signifikan** terhadap laba bersih perusahaan. Hal dapat diketahui dari nilai  $t_{hitung} (3,283) > t_{tabel} (2,008)$  dengan nilai probabilitas signifikansi  $0,002 < 0,05$ . Dengan demikian,  $H_2$  diterima yang berarti besar kecilnya beban pajak kini yang ditanggung perusahaan akan mempengaruhi laba bersih perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* tahun 2014-2019.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Achmad Hidayat (2018) yang menyatakan beban pajak saat ini berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Beban pajak kini merefleksikan penghasilan kena pajak yang sudah dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Beban pajak kini juga merupakan beban pajak yang bersifat tetap dan pembayarannya tidak dapat ditunda. Wajib pajak diberikan kebebasan membuat kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan penentuan saat mengakui pendapatan dan biaya dalam beberapa hal, meskipun kebijakan akuntansi tersebut harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun.<sup>130</sup> Inilah yang sering menjadi peluang bagi perusahaan untuk menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan melalui pengakuan pendapatan dan beban, sehingga besar kecilnya nilai beban pajak kini akan berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka besaran beban pajak kini akan semakin tinggi pula karena sistem perpajakan yang umumnya bersifat

---

<sup>130</sup> Vincent Junery, Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Bank Dan Lembaga Keuangan yang Terdaftar di BEI 2010-2013), *JOM Fekon*, Vol. 3, No. 1, hlm. 153

progresif atau berdasarkan laba. Sistem pajak progresif adalah sistem perpajakan dimana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan sebuah perusahaan. Dalam sistem pajak berbasis laba, beban pajak kini dihitung berdasarkan presentase dari laba yang diperoleh. Jadi, apabila suatu perusahaan memperoleh laba yang lebih tinggi maka jumlah pajak kini yang harus dibayar akan meningkat.

#### 4.3.3 Pengaruh Pajak Tangguhan Terhadap Laba Bersih

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah pajak tangguhan berpengaruh terhadap keuntungan atau laba bersih perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel pajak tangguhan **tidak memiliki pengaruh signifikan** terhadap laba bersih perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t_{hitung}$  variabel pajak tangguhan, yaitu sebesar -0,436 kurang dari nilai  $t_{tabel}$  yaitu 2,008 dengan nilai probabilitas signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,665. Dengan demikian,  $H_3$  ditolak artinya besar kecilnya pajak tangguhan milik perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* tahun 2014-2019.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Achmad Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa pajak tangguhan berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian Elyzabet I. Marpaung dan Lauw Tjun (2016) yang menyatakan bahwa pajak tangguhan tidak mempengaruhi kinerja perusahaan. Laba bersih menjadi salah satu tolak ukur atau indikator penentu kinerja perusahaan. Beban pajak tangguhan ditambahkan pada beban pajak kini untuk menghitung total beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi, sehingga beban pajak tangguhan mengurangi laba bersih saat diakui, karena hal ini merupakan penyesuaian pajak untuk periode berjalan yang akan mempengaruhi laporan laba rugi di masa depan. Pajak tangguhan muncul karena terdapat perbedaan temporer atas pengakuan penghasilan ataupun biaya antara akuntansi komersial

dengan fiskal. Pajak tangguhan hanya dapat mencerminkan efek pajak yang ditimbulkan oleh perbedaan temporer antara akuntansi dan pajak, sehingga hanya bersifat sementara dan nilainya tidak berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan.<sup>131</sup>

Christina Ranty Sumomba dan YB. Sigit Hutomo (2012) menjelaskan pendapat Hanna (2009) dalam Poterba et al. (2010) bahwa pemotongan tarif pajak perusahaan akan menyebabkan sekelompok kecil perusahaan mencoba mempengaruhi laba dengan mengambil biaya yang tinggi, sehingga perusahaan melaporkan pendapatan bersih kuartal yang lebih rendah dan laba per saham yang lebih rendah.<sup>132</sup>

#### **4.3.4 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* (DER), Beban Pajak Kini, dan Pajak Tangguhan terhadap Laba Bersih Perusahaan**

*Debt to Equity Ratio*, beban pajak kini, dan pajak tangguhan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung}$  pada hasil output SPSS sebesar 3,743. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yakni sebesar 2,79. Sedangkan, nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar  $0,017 > 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel bebas (*independent variable*) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (*dependent variable*) karena nilai  $F_{hitung} >$  dari nilai  $F_{tabel}$  dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan ketiga variabel tersebut agar dapat memperoleh laba bersih yang optimal dan sesuai dengan tujuan perusahaan. *Debt to Equity Ratio*, beban pajak kini dan pajak tangguhan berpengaruh terhadap laba bersih karena perusahaan

---

<sup>131</sup> Elyzabet I. Marpaung dan Lauw Tjun Tjun, “Pengaruh Pajak Tangguhan dan *Tax to Book Ratio* Terhadap Kinerja Perusahaan”, Jurnal Akuntansi, Vol. 8 No. 1, 2016, hlm. 3

<sup>132</sup> Christina Ranty Sumomba dan YB. Sigit Hutomo, “Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba”, KINERJA, Vol. 16, No. 2, 2012, hlm. 112.

mampu memanfaatkan hutang terhadap modal sendiri dengan baik atau secara maksimal sehingga dapat meningkatkan laba. Perusahaan juga telah mampu memanfaatkan beban pajak kini dan pajak tangguhan dengan cukup baik, sehingga hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya laba.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan pada bab IV, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel *Debt to Equity Ratio* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tingkat hutang yang rendah atau masih berada dalam batas normal dan perusahaan masih dapat memenuhi kewajibannya menggunakan modal sendiri milik perusahaan.
2. Variabel beban pajak kini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan sebesar 52,7%. Hal tersebut berarti bahwa setiap kenaikan atau penurunan angka beban pajak kini yang dibebankan dan ditanggung perusahaan akan mempengaruhi angka laba bersih yang dimiliki perusahaan karena beban pajak kini bersifat tetap dan pembayarannya tidak dapat ditunda.
3. Variabel pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih perusahaan. Hal ini disebabkan karena beban pajak tangguhan bersifat sementara dan timbul karena adanya perbedaan temporer atas pengakuan biaya atau penghasilan antara akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan, sehingga besar kecilnya angka beban pajak tangguhan tidak mempengaruhi laba bersih perusahaan.
4. *Debt to Equity Ratio*, beban pajak kini, dan pajak tangguhan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan sebesar 33,5%. Hal tersebut mengartikan bahwa besar kecilnya angka masing-masing variabel bebas, apabila digunakan dalam laporan keuangan secara bersamaan maka akan mempengaruhi laba bersih perusahaan..

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa banyak keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII), sehingga tidak mewakili dari keseluruhan perusahaan yang ada di BEI.
2. Periode pengamatan terbatas pada 6 tahun pengamatan yaitu selama tahun 2014-2019 dan belum menggunakan tahun terbaru.
3. Variabel dalam penelitian terbatas pada *Debt to Equity Ratio*, beban pajak kini, dan beban pajak tangguhan dalam pengaruhnya terhadap laba atau keuntungan bersih perusahaan, sedangkan masih banyak variabel lain yang bisa mempengaruhi laba bersih perusahaan.

## 5.3 Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki beberapa rekomendasi atau saran, yaitu:

1. Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat memperbanyak populasi perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian, sehingga tidak terbatas pada perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII).
2. Menambah variabel atau unsur lain yang dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan sehingga hasil yang diperoleh lebih beragam dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian lebih baik sehingga dapat diketahui lebih luas perkembangan dan perubahan terkait laba bersih perusahaan.

#### **5.4 Penutup**

Alhamdulillah, ucapan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas kehendak-Nya peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari dan mengakui bahwa skripsi ini belum sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan peneliti. Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya dapat menyempurnakan skripsi ini. Harapan peneliti, penelitian ini dapat dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti pribadi maupun dapat bermanfaat bagi orang lain atau peneliti berikutnya sebagai salah satu bahan rujukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Kementrian. 2012. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Puataka Indonesia.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agustina, Dea Nony dan Mulyadi. 2019. *Pengaruh Debt To Equity Ratio, Total Asset Turn Over, Current Ratio, Dan Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia*. Advance: Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 1.
- al Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ismail. 1407 H/ 1987 M. *al-Jami’ al-Sahih*. Beirut: Dar Ibn Kasir. Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi. 2013. Jakarta: Almahira.
- Amanda, Felicia dan Meiriska Febrianti. 2015. *Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan Dan Basis Akrual Terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Ultima Accounting. Vol. 7. No. 1.
- Annisa, Yosy. 2018. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, Perencanaan Pajak, Leverage Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan LQ 45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)*. JOM FEB. Vol. 1. Edisi 1.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2018. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asita, Asti. 2017. *Pengaruh Likuiditas, Hutang, Beban Pemasaran Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Laba Bersih Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2016*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin.
- Astriningrum, Andini Retno et. al. 2018. *Pengaruh Penjualan, Beban Pokok Penjualan, Pajak Dan Biaya Keuangan Terhadap Laba Rugi Perusahaan Jasa Telekomunikasi*. Jurnal Ekonomi Manajemen. ISSN 2477-2275. Vol. 4. No. 2.
- Aziz, Abdul dan Ramdansyah. 2016. *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 4. No. 1.
- Diana, Ilfi Nur. 2008. *Hadis-hadis Ekonomi*. Malang: UIN-Malang Press.

- Ekasari, Kurnia. 2014. *Hermeneutika Laba Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 5. No. 1.
- Febriana, Jeni Irnawati et. al. 2022. *PENGARUH CURRENT RATIO (CR) DAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TERHADAP LABA BERSIH PADA PT DARYA-VARIA LABORATORIA TBK*. Pamulang: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi. Vol. 4. No. 2. ISSN: 2549-2284.
- Friatna, Ida. 2012. *Konsep Laba dalam Ekonomi Islam*. Banda Aceh: PeNA.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Vera dan Mayasari. 2018. *Analisis Pengaruh Hutang Terhadap Laba Bersih Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)*. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis. Vol. 18. No. 1. ISSN : 1693-759.
- Harahap, Lisma Yanti, et.al. 2019. *Hukum Pelaksanaan Pelunasan Hutang Piutang Dengan Menggunakan Tenaga Menurut Imam Malik (Studi Kasus Di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)*. Islamic Business Law Review. Vol. 1. No. 1.
- Hermawan, Asep dan Husna Leila Yusran. 2017. *Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: KENCANA.
- Hidayat, Achmad. 2018. *Analisis Pengaruh Beban Pajak Kini Dan Pajak Tangguhan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Agribisnis Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2012-2014*. Jakarta: Jurnal Lentera Akuntansi. Vol. 3 No. 1.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irawan, Dedi dan Nurhadi Kusuma. 2019. *Pengaruh Struktur Modan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan*. Lampung: Jurnal Aktual STIE Trisna Negara, Vol. 17, No. 1.
- Junery, Vincent. 2016. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, Dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Bank Dan Lembaga Keuangan yang Terdaftar di BEI 2010-2013)*. JOM Fekon. Vol. 3. No. 1.
- Jusup, Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi JILID 2*. Yogyakarta: STIE YKPN.

- Latan, Hengky dan Selva Temalagi. 2013. *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Bandung: Alfabeta.
- Lubis, Rahmat Hidayat. 2018. *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Marpaung, Elyzabet I. dan Lauw Tjun Tjun. 2016. *Pengaruh Pajak Tangguhan dan Tax to Book Ratio Terhadap Kinerja Perusahaan*. Jurnal Akuntansi. Vol. 8 No. 1.
- Martono, Nanang. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Masril. 2017. *Pengaruh Pendapatan Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Plastik Dan Kaca Yang Listing Di Bei Periode 2010 – 2014*. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis. Vol. 8. No. 1.
- Maulana, Zefri dan Ayang Fhonna Safa. 2017. *Pengaruh Hutang Jangka Pendek dan Hutang Jangka Panjang Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Mandiri Tbk*. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI). Vol. 1. No. 1.
- Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: ANDI.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muslim, Imam. t.th. *Shahih Muslim Juz III*. Indonesia: Maktabat Dahlan.
- Nalsal, Pindonta dan Yeni Widyawati. 2015. *Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Bank Swasta Yang Terdaftar Di BEI*. Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis. ISSN: 2337-6112. Vol. 3. No. 3.
- Nasrullah, HS, et. al. 2014. *Analisis Tindakan Perataan Laba dalam Meraih Keuntungan Perusahaan Ditinjau Menurut Etika Ekonomi Islam*. Jurnal SHARE. Vol. 3. No. 2.
- Pratama, Deri Putra. 2019. *Analisis Pengaruh Debt To Equity Ratio, Current Ratio, Inventory TurnOver Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Manufaktur (Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2015-2017)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Priyastama, Romie. 2017. *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Yogyakarta: Star Up.
- Rosita, Maizah dan Rilla Gantino. 2017. *Pengaruh Utang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Food & Beverages Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol. 5. No. 1.
- Sarwono, Jonathan. 2011. *Mixed Methods: Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media.
- Silooy, Revy Wilhelmina. 2015. *Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Kini Dalam Mendeteksi Income Maximization*. Jurnal SOSOQ. Vol. 4. No. 2.
- Simamora, Henry. 2000. *Akuntansi Basis Pegambilan Keputusann Bisnis Jilid II*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siregar, Syofian. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Suandy, Erly. 2017. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subramanyam, K.R., Wild, J. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sumomba, Christina Ranty dan YB. Sigit Hutomo. 2012. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba*. Yogyakarta: KINERJA. Vol. 16, No. 2.
- Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

- Tampubolon, Karianton. 2017. *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak: Praktik Akuntansi Perpajakan, PPh Badan, Manajemen Pajak, dan Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks.
- Triyuwono, Iwan dan Mohammad As'udi. 2001. *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utari, Lisa. 2022. *Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Debt To Asset Ratio (DAR) dan Inventory Turnover (ITO) terhadap Laba Bersih pada Sub Sektor Pulp & Paper yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2021*. Jambi: Science of Management and Students Research Journal (SMS). Vol. 1 No. 1. ISSN 2657-1633.
- Waluyo. 2017. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo. 2019. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Depok: Rajawali Pers.
- Yadiati, Winwin. 2007. *Teori Akuntansi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Website:
- Wahyuni, Nurseffi Dwi. "Sariwangi Dinyatakan Pailit", diakses dari <https://m.liputan6.com> pada Kamis, 3 September 2020.
- <https://m.cnnindonesia.com>, diakses pada Minggu, 23 Februari 2020.
- <https://www.tirto.id>, diakses pada Minggu, 23 Februari 2020.
- <https://m.cnnindonesia.com>, diakses pada Minggu, 23 Februari 2020.
- <https://www.idx.co.id> diakses pada Selasa, 11 Agustus 2020.
- <https://www.ojk.go.id> diakses pada Selasa, 11 Agustus 2020.

## LAMPIRAN - LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Total Hutang Periode 2014-2019

#### Total Hutang Periode 2014-2019

Dalam Milyar Rp

NO	KODE	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	AKRA	Rp 8.824	Rp 7.917	Rp 7.756	Rp 7.794	Rp 10.014	Rp 11.342
2	ASII	Rp115.840	Rp118.902	Rp121.949	Rp139.325	Rp170.348	Rp165.195
3	ICBP	Rp 10.445	Rp 10.174	Rp 10.401	Rp 11.295	Rp 11.660	Rp 12.038
4	INDF	Rp 45.803	Rp 48.710	Rp 38.364	Rp 41.298	Rp 46.621	Rp 41.996
5	KLBF	Rp 2.675	Rp 2.758	Rp 2.762	Rp 2.722	Rp 2.852	Rp 3.559
6	TLKM	Rp 55.830	Rp 72.745	Rp 74.067	Rp 86.354	Rp 88.893	Rp103.958
7	UNTR	Rp 21.777	Rp 22.465	Rp 21.369	Rp 34.724	Rp 59.230	Rp 50.603
8	UNVR	Rp 9.534	Rp 10.903	Rp 12.041	Rp 14.845	Rp 12.943	Rp 15.368
9	WIKA	Rp 11.032	Rp 14.164	Rp 18.617	Rp 31.052	Rp 42.015	Rp 42.895

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Lampiran 2 : Total Ekuitas 2014-2019**

**Total Ekuitas 2014-2019**

**Dalam Milyar Rp**

NO	KODE	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	AKRA	Rp 5.966	Rp 7.286	Rp 8.074	Rp 9.030	Rp 9.927	Rp 10.067
2	ASII	Rp120.187	Rp126.533	Rp139.906	Rp156.505	Rp174.363	Rp186.763
3	ICBP	Rp 14.584	Rp 16.387	Rp 18.501	Rp 20.324	Rp 22.707	Rp 26.671
4	INDF	Rp 40.274	Rp 43.122	Rp 44.335	Rp 47.103	Rp 49.917	Rp 54.202
5	KLBF	Rp 9.764	Rp 10.938	Rp 12.464	Rp 13.894	Rp 15.295	Rp 16.706
6	TLKM	Rp 85.992	Rp 93.428	Rp105.544	Rp112.130	Rp117.303	Rp117.250
7	UNTR	Rp 38.530	Rp 39.250	Rp 42.622	Rp 47.538	Rp 57.051	Rp 61.110
8	UNVR	Rp 4.747	Rp 4.827	Rp 4.704	Rp 5.007	Rp 7.384	Rp 5.282
9	WIKA	Rp 4.877	Rp 5.438	Rp 12.738	Rp 14.632	Rp 17.215	Rp 19.216

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Lampiran 3 : Total Asset Periode 2013-2018**

**Total Asset Periode 2013-2018**

**Dalam Milyar Rp**

NO	KODE	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	AKRA	Rp 14.630	Rp 14.790	Rp 15.203	Rp 15.831	Rp 16.823	Rp 19.941
2	ASII	Rp213.994	Rp236.027	Rp245.435	Rp261.855	Rp295.830	Rp344.711
3	ICBP	Rp 21.410	Rp 25.029	Rp 26.561	Rp 28.902	Rp 31.620	Rp 34.367
4	INDF	Rp 77.778	Rp 86.077	Rp 91.832	Rp 82.700	Rp 88.401	Rp 96.538
5	KLBF	Rp 11.319	Rp 12.439	Rp 13.696	Rp 15.226	Rp 16.616	Rp 18.146
6	TLKM	Rp128.555	Rp141.822	Rp166.173	Rp179.611	Rp198.484	Rp206.196
7	UNTR	Rp 57.362	Rp 60.307	Rp 61.715	Rp 63.991	Rp 82.262	Rp116.281
8	UNVR	Rp 12.703	Rp 14.281	Rp 15.730	Rp 16.746	Rp 19.852	Rp 20.327
9	WIKA	Rp 12.595	Rp 15.909	Rp 19.602	Rp 31.355	Rp 45.684	Rp 59.230

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Lampiran 4 : Beban Pajak Kini Periode 2014-2019**

**Beban Pajak Kini Periode 2014-2019**

**Dalam Milyar Rp**

NO	KODE	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	AKRA	Rp 202	Rp 277	Rp 184	Rp 157	Rp 179	Rp 173
2	ASII	Rp 5.885	Rp 5.313	Rp 5.022	Rp 6.201	Rp 7.746	Rp 7.720
3	ICBP	Rp 991	Rp 1.250	Rp 1.473	Rp 1.577	Rp 1.856	Rp 2.072
4	INDF	Rp 2.170	Rp 2.018	Rp 2.484	Rp 2.492	Rp 2.559	Rp 2.817
5	KLBF	Rp 649	Rp 681	Rp 794	Rp 777	Rp 797	Rp 849
6	TLKM	Rp 7.616	Rp 8.365	Rp10.738	Rp11.357	Rp 9.432	Rp10.619
7	UNTR	Rp 2.624	Rp 2.634	Rp 1.546	Rp 3.136	Rp 4.494	Rp 4.763
8	UNVR	Rp 1.873	Rp 1.905	Rp 2.164	Rp 2.302	Rp 3.115	Rp 2.432
9	WIKA	Rp 375	Rp 376	Rp 55	Rp 114	Rp 203	Rp 145

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Lampiran 5 : Pajak Tangguhan Periode 2014-20219**

**Pajak Tangguhan Periode 2014-2019**

**Dalam Milyar Rp**

NO	KODE	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	AKRA	Rp 10	Rp 43	Rp 112	Rp 32	Rp 26	Rp 7
2	ASII	Rp 958	Rp 1.296	Rp 1.071	Rp 185	Rp 123	Rp 287
3	ICBP	Rp 120	Rp 164	Rp 115	Rp 86	Rp 68	Rp 5
4	INDF	Rp 314	Rp 287	Rp 48	Rp 5	Rp 74	Rp 30
5	KLBF	Rp 6	Rp 18	Rp 53	Rp 11	Rp 12	Rp 16
6	TLKM	Rp 277	Rp 340	Rp 1.721	Rp 1.399	Rp 6	Rp 303
7	UNTR	Rp 949	Rp 1.234	Rp 80	Rp 286	Rp 283	Rp 421
8	UNVR	Rp 127	Rp 73	Rp 18	Rp 66	Rp 49	Rp 77
9	WIKA	Rp 20	Rp 19	Rp 29	Rp 7	Rp 83	Rp 23

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Lampiran 6 : Laba Bersih Periode 2014-2019****Laba Bersih Periode 2014-2019****Dalam Milyar Rp**

NO	KODE	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	AKRA	Rp 791	Rp 1.059	Rp 1.047	Rp 1.305	Rp 1.597	Rp 703
2	ASII	Rp22.131	Rp15.613	Rp18.302	Rp23.121	Rp27.372	Rp26.621
3	ICBP	Rp 2.574	Rp 2.923	Rp 3.631	Rp 3.543	Rp 4.659	Rp 5.360
4	INDF	Rp 5.229	Rp 3.710	Rp 5.267	Rp 5.097	Rp 4.962	Rp 5.903
5	KLBF	Rp 2.123	Rp 2.058	Rp 2.351	Rp 2.453	Rp 2.497	Rp 2.538
6	TLKM	Rp21.274	Rp23.317	Rp29.172	Rp32.701	Rp26.979	Rp27.592
7	UNTR	Rp 4.832	Rp 2.792	Rp 5.104	Rp 7.673	Rp11.498	Rp11.135
8	UNVR	Rp 5.927	Rp 5.852	Rp 6.391	Rp 7.005	Rp 9.081	Rp 7.393
9	WIKA	Rp 744	Rp 703	Rp 1.211	Rp 1.356	Rp 2.073	Rp 2.621

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

## Lampiran 7 : Data Penelitian

## Data Penelitian

No	Kode	Tahun	<i>DER_X1</i>	<i>Beban Pajak Kini_X2</i>	<i>Pajak Tangguhan_X3</i>	<i>Laba Bersih_Y</i>
1	AKRA	2014	147,9048	0,013807	0,000683527	791
		2015	108,6604	0,018729	0,00290737	1059
		2016	96,06143	0,012103	0,007366967	1047
		2017	86,31229	0,009917	0,002021351	1305
		2018	100,8764	0,01064	0,001545503	1597
		2019	112,6651	0,008676	0,000351036	703
2	ASII	2014	96,38314	0,027501	0,004476761	22131
		2015	93,96916	0,02251	0,005490897	15613
		2016	87,16495	0,020462	0,004363681	18302
		2017	89,02271	0,023681	0,000706498	23121
		2018	97,69733	0,026184	0,000415779	27372
		2019	88,45167	0,022396	0,000832581	26621
3	ICBP	2014	71,61958	0,046287	0,005604858	2574
		2015	62,0858	0,049942	0,006552399	2923
		2016	56,21858	0,055457	0,004329656	3631
		2017	55,57469	0,054564	0,002975573	3543
		2018	51,3498	0,058697	0,002150538	4659
		2019	45,13517	0,06029	0,000145488	5360
4	INDF	2014	113,7285	0,0279	0,004037131	5229
		2015	112,9586	0,023444	0,003334224	3710
		2016	86,53209	0,027049	0,000522694	5267
		2017	87,67594	0,030133	6,04595E-05	5097
		2018	93,39704	0,028948	0,000837095	4962
		2019	77,48054	0,02918	0,000310758	5903
5	KLBF	2014	27,39656	0,057337	0,000530082	2123

		2015	25,21485	0,054747	0,001447062	2058
		2016	22,15982	0,057973	0,003869743	2351
		2017	19,59119	0,051031	0,000722448	2453
		2018	18,64662	0,047966	0,000722195	2497
		2019	21,30372	0,046787	0,000881737	2538
6	TLKM	2014	64,92464	0,059243	0,00215472	21274
		2015	77,8621	0,058982	0,002397371	23317
		2016	70,17642	0,064619	0,010356676	29172
		2017	77,0124	0,063231	0,007789055	32701
		2018	75,78067	0,04752	3,02291E-05	26979
		2019	88,66354	0,0515	0,001469476	27592
7	UNTR	2014	56,5196	0,045745	0,01654231	4832
		2015	57,23567	0,043677	0,02046197	2792
		2016	50,13608	0,025051	0,001296281	5104
		2017	73,04472	0,049007	0,004469379	7673
		2018	103,8194	0,05463	0,003440228	11498
		2019	82,80641	0,040961	0,00362054	11135
8	UNVR	2014	200,8426	0,147445	0,009997638	5927
		2015	225,8753	0,133394	0,005111687	5852
		2016	255,9736	0,137572	0,00114431	6391
		2017	296,4849	0,137466	0,00394124	7005
		2018	175,2844	0,156911	0,002468265	9081
		2019	290,9504	0,119644	0,003788065	7393
9	WIKA	2014	226,2046	0,029774	0,001587932	744
		2015	260,4634	0,023634	0,001194293	703
		2016	146,1532	0,002806	0,001479441	1211
		2017	212,2198	0,003636	0,00022325	1356
		2018	244,0604	0,004444	0,001816829	2073
		2019	223,2254	0,002448	0,000388317	2621

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

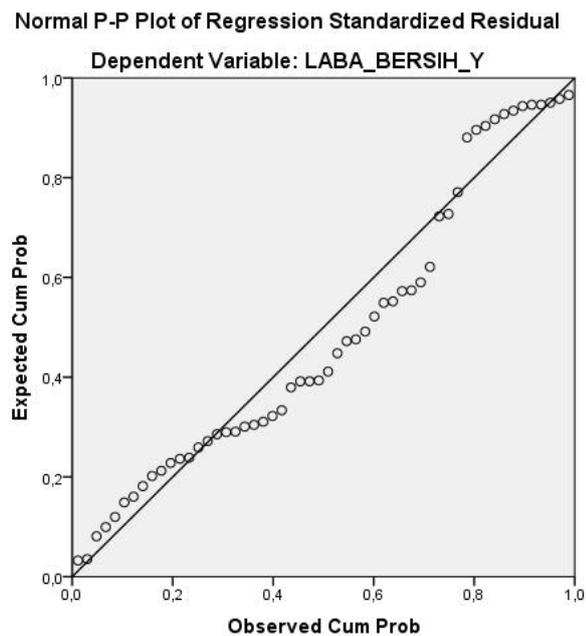
## Lampiran 8 : Hasil Output SPSS

### Hasil Statistik Deskriptif

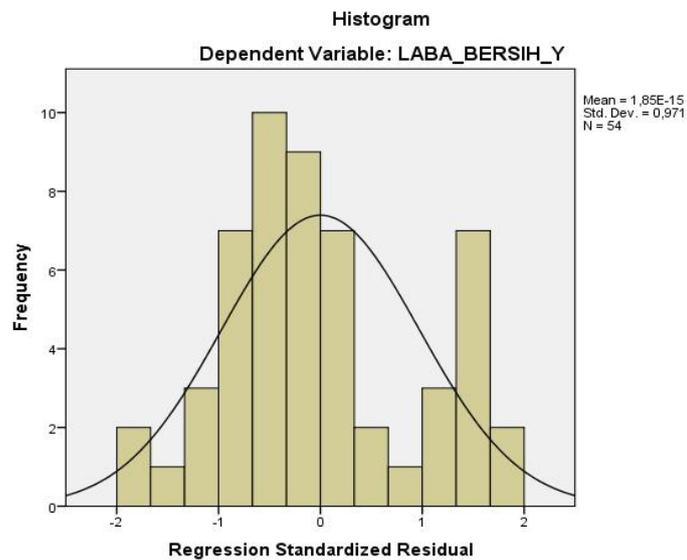
#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DER_X1	54	18,65	296,48	109,0548	72,97477
BEBAN_PAJAK_KINI_X2	54	,00245	,15691	,0468088	,03756811
PAJAK_TANGGUHAN_X3	54	,00003	,02046	,0032845	,00389606
LABA_BERSIH_Y	54	703	32701	8536,41	9216,675
Valid N (listwise)	54				

### Grafik Normal Probability Plot (P-P Plot) of Regression



## Diagram Histogram



## Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,43409218
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,111
	Negative	-,109
Test Statistic		,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		,095 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

### Hasil Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	DER_X1	,948	1,055
	BEBAN_PAJAK_KINI_X2	,871	1,148
	PAJAK_TANGGUHAN_X3	,904	1,107

a. Dependent Variable: LABA\_BERSIH\_Y

### Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,617 <sup>a</sup>	,381	,335	,31151	2,039

### Uji Heteroskedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,364	,296		1,227	,225
	DER_X1	-,014	,121	-,017	-,116	,908
	BEBAN_PAJAK_KINI_X2	-,003	,092	-,005	-,031	,976
	PAJAK_TANGGUHAN_X3	-,004	,065	-,009	-,062	,951

a. Dependent Variable: ABRESID

a. Dependent Variable: ABRESID

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,163	,515		8,085	,000
DER_X1	,085	,210	,053	,406	,687
BEBAN_PAJAK_KINI_X2	,527	,161	,450	3,283	,002
PAJAK_TANGGUHAN_X3	-,049	,113	-,059	-,436	,665

a. Dependent Variable: LABA\_BERSIH\_Y

### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,617 <sup>a</sup>	,381	,335	,31151

a. Predictors: (Constant), PAJAK\_TANGGUHAN\_X3, DER\_X1, BEBAN\_PAJAK\_KINI\_X2

b. Dependent Variable: LABA\_BERSIH\_Y

### Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,243	3	,748	3,743	,017 <sup>b</sup>
	Residual	9,987	50	,200		
	Total	12,230	53			

a. Dependent Variable: LABA\_BERSIH\_Y

### Hasil Uji Statistik T

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,163	,515		8,085	,000
DER_X1	,085	,210	,053	,406	,687
BEBAN_PAJAK_KINI_X2	,527	,161	,450	3,283	,002
PAJAK_TANGGUHAN_X3	-,049	,113	-,059	-,436	,665

a. Dependent Variable: LABA\_BERSIH\_Y

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Dewi Larasati  
Tempat, Tgl Lahir : Kebumen, 20 Juni 1998  
NIM : 1605046005  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Dk. Kebayeman, RT 003 RW 001 Desa Kalirejo  
Kec. Kebumen  
Kab. Kebumen  
Telepon : +6289 966 725 89  
e-mail : dewilaras1520@gmail.com

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

2004 – 2010 SD Negeri 2 Kalirejo  
2010 – 2013 MTs Negeri Kebumen 1  
2013 – 2016 MA Negeri 2 Kebumen  
2016 – 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo  
Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 03 Desember 2021

Penulis



Dewi Larasati

NIM. 1605046005